


# LKJIP
# DPMPTSP
KABUPATEN KEDIRI

2025

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.

Salah satu maksud penyusunan laporan ini sebagai bahan evaluasi kinerja dan bukti pertanggung jawaban terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri khususnya dan Pemerintah Kabupaten Kediri pada umumnya, sehingga pada akhirnya berdampak luas pada masyarakat selaku penerima manfaat.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri merupakan salah satu unsur pelaksana teknis Pemerintah Kabupaten Kediri yang bertanggung jawab di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Sebagai salah satu perangkat birokrasi maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri harus menyajikan laporan hasil kerja selama satu tahun anggaran, sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999. Laporan hasil kerja tersebut terangkum dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri yang merupakan Hasil Evaluasi Kinerja selama Tahun Anggaran 2025.

Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari 2 (dua) bagian yang tidak terpisahkan yaitu Evaluasi dan Analisis Kinerja Kegiatan serta Evaluasi dan Analisis Pencapaian Sasaran. Kedua analisis ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar program dan kegiatan yang dilaksanakan serta sasaran yang ditetapkan dapat tercapai. Kemudian langkah-langkah apa saja yang telah diambil demi perbaikan dimasa mendatang.

Laporan ini menyajikan hasil kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) selama Tahun 2025. Untuk itu, bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu keberadaan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2025 ini harus dijadikan bahan acuan, evaluasi dan perbaikan kinerja di tahun-tahun mendatang.

Dalam rangka mendukung upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dimasa yang akan datang, maka diharapkan adanya saran, masukan dan kritik yang membangun dari berbagai pihak.

Akhirnya diharapkan laporan ini dapat memberikan informasi yang berguna bagi semua pihak yang berkepentingan dan disampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerjasama dan mendukung dalam penyelesaian laporan ini.

Kediri,  Januari 2026

KEPALA DPMPTSP

KABUPATEN KEDIRI

**JOKO SUWONO, S.Sos, M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750103 1993

**REALISASI PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

**Realisasi Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

| Sasaran Strategis | Indikator | Target 2025 | Realisasi 2025 | Capaian 2025 |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5= (4/3x100%)* |
| Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Di Daerah | Nilai Realisasi Investasi Di Daerah (Juta Rupiah) | 1.541.237,28 | 1.688.461,12 | 109,55% |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan | 88,13 | 89,52 | 101,58% |
| | Jumlah Kemitraan Usaha Yang Bisa Didorong | 3 Mou | 3 Mou | 100% |

**Realisasi Anggaran Tahun 2025**

| Program | Anggaran | Realisasi Anggaran | Capaian Anggaran |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4=(3/2x100%)* |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota | 5.096.246.003,00 | 1.922.509.491,00 | 88,55% |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | 263.877.800,00 | 254.365.442,00 | 96,40% |
| Program Promosi Penanaman Modal | 166.287.300,00 | 165.395.150,00 | 99,46% |
| Program Pelayanan Penanaman Modal | 519.547.000,00 | 486.111.572,00 | 93,56% |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | 275.886.200,00 | 248.223.961,00 | 89,97% |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | 105.793.040,00 | 105.587.200,00 | 99,81% |
| **JUMLAH** | **7.745.590.205,00** | **6.939.138.599,00** | **89,59%** |

Data capaian kinerja dan keuangan diatas diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja pada tahun ke tahun berikutnya. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat meningkatkan kinerja tersebut.

# RINGKASAN EKSEKUTIF

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri tertuang dalam 30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri; dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Pada Tahun 2025 Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri terdiri dari 6 Program yang selanjutn ya terinci dalam 13 Kegiatan, yaitu: Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, Program Promosi Penanaman Modal, Program Pelayanan Penanaman Modal, Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

Untuk Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri diserahi tanggung jawab untuk mengelola sejumlah dana belanja APBD Kabupaten Kediri (DAU) senilai Rp. 7.745.590.205,- .

Dalam upaya mempercepat pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, sebagaimana arah pembangunan sektor Ekonomi yang tertuang dalam Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, dalam pelaksanaan pembangunan telah mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan Pembangunan di sektor penanaman modal dan pelayanan terpadu satu

pintu, dengan suatu keberhasilan-keberhasilan yang dihasilkan diantaranya sebagai berikut:

1. Nilai realisasi investasi pada Tahun 2025 mencapai Rp. 1.688.461.116.537,- jauh melampaui target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp. 1.541.237.276.775,-
2. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) terhadap pelayanan perizinan yang meningkat dari tahun sebelumnya, yang mana pada Tahun 2025 mencapai angka 89,52 sementara pada Tahun 2024 mencapai angka 85,05;
3. Capaian indicator Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong pada Tahun 2025 yang dicapai DPMPTSP sebesar 3 Pernyataan Minat/Mou sementara pada Tahun 2024 yang dicapai DPMPTSP sebesar 12 Pernyataan Minat/Mou

Meskipun realisasi kinerja sasaran dan anggaran pada tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Hal itu merupakan satu bagian dari gambaran besar target kerja dari DPMPTSP kabupaten Kediri. Banyak tugas yang harus dilaksanakan ke depan untuk mencapai tujuan/sasaran Rencana strategis DPMPTSP dengan optimalisasi sumberdaya yang ada. Selanjutnya DPMPTSP merumuskan rencana tindaklanjut sebagai berikut:

1. Dengan selesainya Proyek Strategis Nasional pada tahun 2025, target realisasi investasi dievaluasi pada periode Renstra 2025-2029 sesuai hasil analisis dari tren tahun sebelumnya (target investasi);
2. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana dinas untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan SKPD dan salah satu unsur penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengadaan sarana prasarana pada tahun sebelumnya menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Sehingga dibelanjakan dengan memperhatikan skala prioritas;
3. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Tahap 2, telah dilakukan pada tahun 2025. Grand Launching MPP Kabupaten Kediri pada tanggal 24 September 2025. Dalam proses perkembangannya diperlukan evaluasi untuk lebih baik ke depannya;

4. Upaya untuk memberikan kemudahan investasi di daerah pada tahun 2025, draft Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal telah dibahas bersama dewan/legislatif, dan menunggu hasil fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal merupakan petunjuk teknis terkait pemberian fasilitasi/ kemudahan penanaman modal;
5. Perlunya penambahan personil yang mempunyai kompetensi di bidang IT dan hukum;
6. Perluasan investasi dengan pengembangan pelaku usaha lokal;
7. Pengembangan investasi sektor logistik dan pergudangan, Kesehatan dan rekreasi, Real estat;
8. Fasilitasi kemitraan UMKM dengan industri besar
9. Hilirisasi hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah;
10. Optimalisasi Promosi investasi dengan memprioritaskan promosi pada sektor efektif;
11. Identifikasi izin skala kecil yang berpotensi berkembang;
12. Penguatan Klinik investasi (K-LINKED) untuk penyelesaian hambatan realisasi;
13. Penyediaan ruang display arsip baik secara manual maupun digital.

# DAFTAR ISI

**KATA PENGANTAR** ..... **i**
**RINGKASAN EKSEKUTIF** ..... **iv**
**DAFTAR ISI** ..... **vii**
**DAFTAR TABEL** ..... **ix**

**BAB I : PENDAHULUAN** ..... **1**
1.1 Latar Belakang ..... 1
1.2 Gambaran Umum ..... 2
1.3 Tugas Pokok dan Fungsi ..... 10
1.4 Landasan Hukum ..... 11
1.5 Sistematika Pelaporan ..... 12
1.6 Permasalahan Strategis ..... 12

**BAB II : PERENCANAAN KINERJA** ..... **14**
2.1 Cascading Kinerja ..... 14
2.2 Rencana Strategis ..... 18
2.3 Perjanjian Kinerja ..... 22
2.4 Rencana Kerja dan Anggaran ..... 23

**BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA** ..... **28**
3.1 Capaian Kinerja Organisasi ..... 28
3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi ..... 28
3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama ..... 55
3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran (Efisiensi) ..... 60
3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya ..... 71
3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah ... 76
3.1.6 *Benchmarking* ..... 76
3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja ..... 77
3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi ..... 90
3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi ..... 90
3.2.2 Penghargaan ..... 91

**BAB IV : PENUTUP..... 92**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

# DAFTAR TABEL


Tabel 1.1 a : Rekomendasi pada DPMPTSP Kabupaten Kediri ..... 2

Tabel 1.2.3 a : Tabel Kondisi Pegawai menurut Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin ..... 5

Tabel 1.2.3 b : Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan ..... 5

Tabel 1.2.3 c : Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan . 6

Tabel 2.2.2 a : Indikator Tujuan dan Sasaran DPMPTSP ..... 19

Tabel 2.2.2 b : Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan DPMPTSP ..... 20

Tabel 2.2.2 c : Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP ..... 20

Tabel 2.3 : Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025 ..... 23

Tabel 2.4 a : Program dan Kegiatan Tahun 2025..... 23

Tabel 3.1.1 a : Capaian Indikator Tujuan DPMPTSP Kabupaten Kediri (Sasaran RPJMD) ..... 28

Tabel 3.1.1 b : Capaian Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP Kabupaten Kediri ..... 29

Tabel 3.1.1 c : Capaian Kinerja Program DPMPTSP Kabupaten Kediri..... 29

Tabel 3.1.1 d : Capaian Kinerja Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kediri ..... 30

Tabel 3.1.1 e : Capaian Kinerja Sub Kegiatan/ Rencana Kerja DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 ..... 51

Tabel 3.1.2 a : Target dan Realisasi Program dan Kegiatan DPMPTSP Tahun 2025 ..... 56

Tabel 3.1.3 a : Efisiensi Pencapaian Kinerja Dan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025 ..... 61

Tabel 3.1.3 b : Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2025 ..... 67

Tabel 3.1.4 a : Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah Tahun 2021-2025 ..... 71

Tabel 3.1.4 b : Jumlah Realisasi Investasi Tahun 2021 – 2025..... 72

Tabel 3.1.4 c : Realisasi Investasi Berdasarkan Kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non PSN ..... 73
Tabel 3.1.4 d : Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan Tahun 2021-2025..... 74
Tabel 3.1.4 e : Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong Tahun 2021-2025 ..... 74
Tabel 3.1.4 f : Rekapitulasi Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya ..... 75
Tabel 3.1.5 a : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2026..... 76
Tabel 3.1.6 a : Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi dan Target Nasional..... 76
Tabel 3.1.7 a : Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja ..... 77
Tabel 3.1.7 b : Perhitungan Indeks Keterkaitan Perizinan–Investasi (IKPI) Tahun 2023-2025 ..... 80
Tabel 3.1.7 c : Perhitungan Interpretasi Tingkat Efektivitas Sektor Perizinan Tahun 2023-2025..... 82

# BAB I
# P E N D A H U L U A N

## 1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan pertanggung jawaban atas perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri yang memuat rencana kinerja, capaian kinerja organisasi dari sasaran dan indikator kinerja yang termuat dalam Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dengan adanya Laporan Kinerja Instansi Daerah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri diharapkan dapat: (1) memberikan informasi terkait pencapaian kinerja organisasi, keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran, target kinerja anggaran dan realisasi kinerja anggaran yang dicapai; (2) memberikan gambaran evaluasi atas kinerja sehingga dapat digunakan sebagai acuan untuk perbaikan tahun berikutnya; (3) transparansi laporan kinerja mendorong Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri untuk selalu berupaya meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Strategi, kebijakan, program dan kegiatan tahun 2025 merupakan salah satu upaya tindaklanjut atas permasalahan pada tahun sebelumnya diantaranya:

**Tabel 1.1 a**

**Rekomendasi pada DPMPTSP Kabupaten Kediri**

| NO | REKOMENDASI | URAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansu Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 700.1.2.1/ /418.11/2025 | a. Seluruh pegawai agar menyusun perjanjian kinerja;<br>b. Dokumen crosscuting agar memuat keterlibatan pihak-pihak/pemagku kepentingan eksternal dalam pencapaian sasaran;<br>c. Mengupload dokumen perencanaan pada website yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum;<br>d. Rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya agar ditindaklanjuti seluruhnya. |

## 1.2. GAMBARAN UMUM

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri, dan yang selanjutnya dijabarkan ke dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Pada Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 6 Program, yaitu: (1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, (2) Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal, (3) Program Promosi Penanaman Modal, (4) Program Pelayanan Penanaman Modal, (5) Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, (6) Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal. Dari keenam program tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam 12 (dua belas) kegiatan. Dari dua belas kegiatan dijabarkan lagi ke dalam 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan.

### 1.2.1. Kedudukan

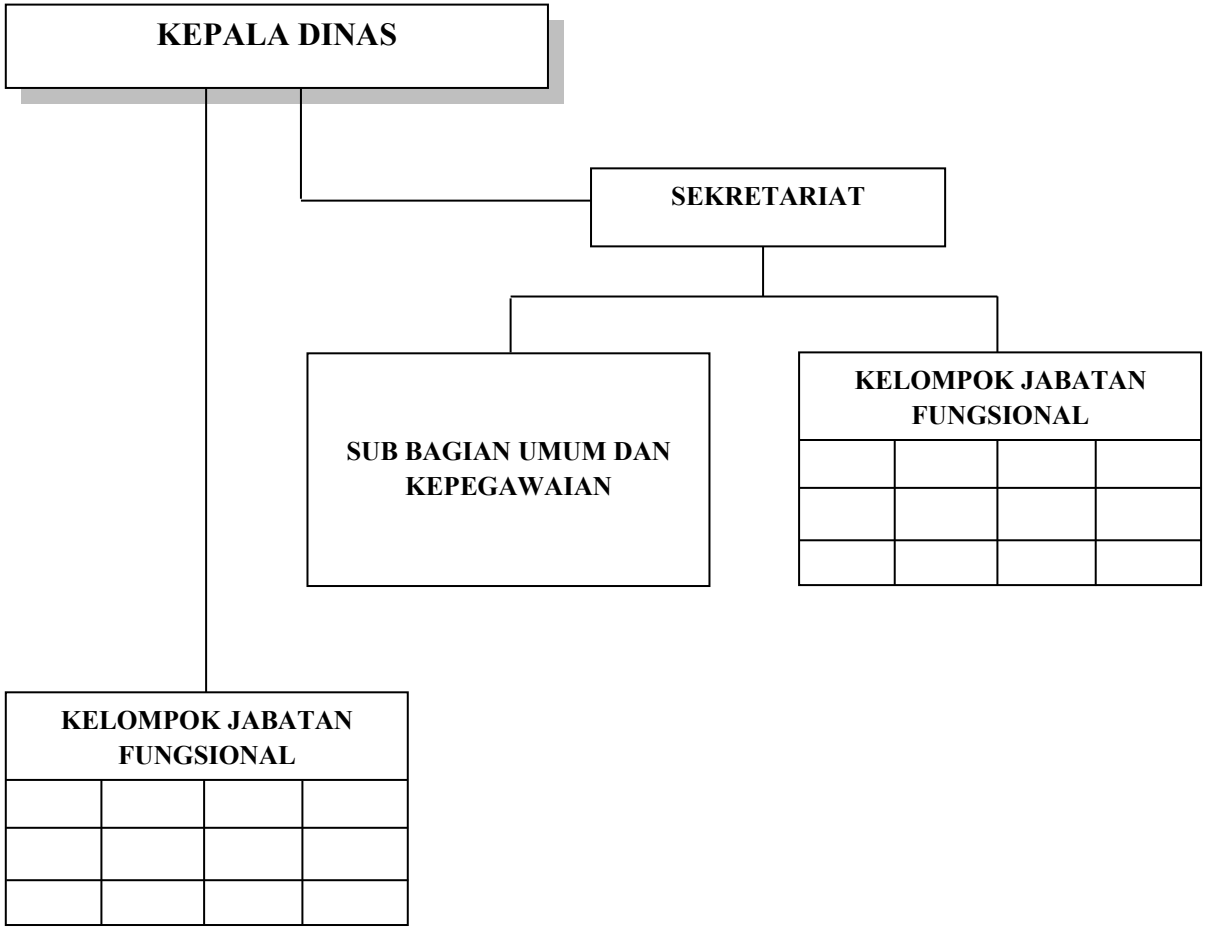
Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, dinyatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Kediri Nomor 40 Tahun 2022, terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri secara lengkap dapat dilihat pada bagan berikut:

**BAGAN ORGANISASI**
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)**



### 1.2.2. Mandat/ Kewenangan Yang Dimiliki

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri merupakan lembaga perangkat daerah yang diserahi tanggung jawab dan wewenang sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang sesuai dengan kedudukannya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sedangkan ruang lingkup pelayanan terpadu satu pintu pada DPMPTSP Kabupaten Kediri tercantum dalam Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kediri.

### 1.2.3. Kekuatan Dari Sumber Daya Yang Ada

***a. Potensi Sumber Daya Manusia / Pegawai yang dimiliki***

Jumlah seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) atau pegawai yang dimiliki oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri per 31 Desember 2025 sebanyak 32 orang dengan rincian seperti dapat dilihat pada tabel – tabel berikut:

**Tabel 1.2.3 a**
**Tabel Kondisi Pegawai menurut**
**Status Kepegawaian dan Jenis Kelamin**

*(orang)*

| No | Status Kepegawaian | Jenis Kelamin | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| | | Laki-laki | Perempuan | |
| 1 | Pegawai Negeri Sipil | 14 | 9 | 23 |
| 2 | Calon Pegawai Negeri Sipil | - | 1 | 1 |
| 3 | PPPK | 3 | 5 | 8 |
| | **Jumlah** | **17** | **15** | **32** |

**Tabel 1.2.3 b**
**Kondisi Pegawai menurut Kepangkatan dan Jabatan**

*(orang)*

| No | Kepangkatan | Eselon | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II | III | IV | Fungsi-onal | Staff | |
| 1 | Golongan IV | 1 | 1 | - | 5 | - | 7 |
| 2 | Golongan III | - | - | 1 | 9 | 5 | 15 |
| 3 | Golongan II | - | - | - | - | 2 | 2 |
| 4 | Golongan I | - | - | - | - | - | 0 |
| 5 | PPPK | - | - | - | - | 8 | 8 |
| | **Jumlah** | **1** | **1** | **1** | **14** | **15** | **32** |

**Tabel 1.2.3 c**
**Kondisi Pegawai menurut Tingkat Pendidikan dan Jabatan**

*(orang)*

| No | Tingkat Pendidikan | Eselon | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | II | III | IV | Fungsi-onal | Staff | |
| 1 | S-2 | 1 | 1 | - | 3 | - | 5 |
| 2 | S-1/DIV | - | - | 1 | 11 | 10 | 22 |
| 3 | Sarjana Muda/DIII | - | - | - | - | - | - |
| 4 | DI/DII | - | - | - | - | - | - |
| 5 | SLTA | - | - | - | - | 5 | 5 |
| 6 | SLTP | - | - | - | - | - | - |
| | **Jumlah** | **1** | **1** | **1** | **14** | **15** | **32** |

## 1.2.4. Peran Strategis Yang Berpengaruh

Ada 2 (dua) faktor yang mempengaruhi peran strategis dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu *Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal.* Dalam menentukan strategi yang akan dipakai dalam mencapai tujuan, perlu dilakukan analisa yang matang dan akurat terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan menggunakan *Analisa SWOT* yang meliputi: *Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats)* yang ada.

Analisis *Kekuatan (Strenghts) dan Kelemahan (Weakness)* dipergunakan untuk menganalisis lingkungan internal instansi/ SKPD, sedangkan analisis *Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats)* dipergunakan untuk menganalisis lingkungan external instansi/ SKPD. Dengan adanya analisis tersebut diharapkan Visi, Misi dan Tujuan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

## 1.2.5. Lingkungan Internal

- ***Analisa Kekuatan (Strenghts)***

  Merupakan kondisi kekuatan yang terdapat dalam organisasi. Kekuatan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Beberapa Kekuatan/kelebihan yang bisa mendukung pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679), yang memberikan kewenangan pemerintah daerah untuk mengembangkan potensi yang dimiliki daerah baik yang berupa Sumber Daya Alam maupun Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan daya tarik investasi dan perekonomian masyarakat;
2. Adanya Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri yang menggantikan Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2004 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri yang sudah tidak sesuai dengan kondisi dan peraturan yang berlaku;
3. Peraturan Bupati Kediri Nomor 63 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Pelayanan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Kediri;
4. Adanya Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;
5. Semakin berkembang pesatnya teknologi informasi baik melalui media audio visual maupun internet sehingga bisa dimanfaatkan untuk membantu mempromosikan potensi daerah ke berbagai daerah dan berbagai negara melalui website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu: http://dpmptsptsp.kedirikab.go.id serta adanya sistem perizinan terintegrasi secara elektronik OSS (*Online Single Submission*) yang mempermudah masyarakat dalam mengajukan izin di DPMPTSP Kabupaten Kediri.

❒ ***Analisa Kelemahan (Weakness)***

Merupakan kondisi kelemahan yang terdapat dalam organisasi. Kelemahan yang dianalisis merupakan faktor yang terdapat dalam tubuh organisasi itu sendiri. Beberapa Kelemahan yang bisa menghambat pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Sarana dan prasarana perkantoran yang dimiliki belum lengkap dan butuh peremajaan;
2. Diperlukannya peningkatan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi pemerintah pusat, provinsi, kabupaten lain dan pihak swasta yang terkait di bidang penanaman modal seperti: BKPM, BPM, KADIN, BI, dan perusahaan besar untuk meningkatkan wawasan dan kerjasama di bidang penanaman modal;
3. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya aparatur pada DPMPTSP Kabupaten Kediri;
4. Sistem monitoring dan evaluasi kinerja belum optimal
5. Perlunya dukungan dari segi alokasi anggaran.

### 1.2.6. Lingkungan Eksternal

❒ ***Analisa Peluang (Opportunity)***

Merupakan kondisi peluang berkembang di masa datang yang terjadi. Kondisi yang terjadi merupakan peluang dari luar organisasi itu sendiri. Misalnya kebijakan pemerintah atau kondisi lingkungan sekitar. Beberapa Peluang yang bisa membantu pelaksanaan penanaman modal dan pelayanan perizinan serta bermanfaat untuk menarik dan meningkatkan investasi di Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Dukungan infrastruktur nasional yang memadai, terutama terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di wilayah/sekitar wilayah Kabupaten Kediri dan Peraturan Presiden tentang Percepatan Pembangunan di Jawa Timur;
2. Adanya pembangunan Central Bussines Development (CBD) di Simpang Lima Gumul (SLG) yang berada jalur strategis sehingga investor bisa berinvestasi di berbagai bidang seperti: pertokoan/mall, perhotelan, perumahan, tempat rekreasi, pendidikan dan industri;

3. Adanya berbagai tempat wisata potensial di Kabupaten Kediri yang dapat dijadikan peluang untuk berinvestasi, seperti investasi di bidang perhotelan, jasa pariwisata, serta fasilitas pendukung pariwisata lainnya;
4. Adanya Komoditas unggulan, andalan dan potensial pada sektor pertanian, sektor perkebunan, sektor perikanan, sektor peternakan, sektor pariwisata, sektor industri dan produk andalan dari sektor kehutanan;
5. Infrastruktur yang mendukung seperti fasilitas jalan yang baik dan memadai;
6. Masyarakat Kabupaten Kediri yang sebagian besar bekerja di sektor agraris memungkin investasi di bidang pengembangan dan pengolahan berbagai produk olahan hasil pertanian menjadi berbagai produk unggulan yang memiliki nilai jual yang tinggi;
7. Makin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan, menjadikan investasi di sektor ini, terutama pendirian lembaga pendidikan seperti universitas, sekolah, kursus, bimbingan belajar, dan diklat keahlian akan semakin memiliki prospek yang cukup bagus;
8. Adanya gerakan reformasi birokrasi dan pengembangan pelayanan publik.

❒ ***Analisa Tantangan (Threath)***

Merupakan kondisi yang mengancam dari luar. Ancaman ini dapat mengganggu organisasi itu sendiri. Beberapa tantangan yang harus diatasi dan diselesaikan dalam pelaksanaan penanaman modal untuk membantu meningkatkan investasi di Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Perlu adanya dukungan dalam penyediaan lahan untuk lokasi usaha bagi calon investor dan apabila memungkinkan pentingya pembuatan kawasan industri dengan melibatkan pihak swasta agar pengendalian dan pengawasan terhadap dampak sosial dan lingkungan dapat dengan mudah ditangani;

2. Pentingnya peningkatan peran serta seluruh masyarakat di Kabupaten Kediri dalam menumbuhkan jiwa kewirausahaan (enterpreneurship) sehingga mampu mengurangi pengganggguran dan meningkatkan perekonomian masyarakat;
3. Pentingnya dukungan/ kolaborasi kerja antar dinas untuk memaksimalkan potensi daerah yang ada sehingga menarik untuk ditawarkan investor;
4. Adanya tuntutan untuk selalu melakukan inovasi baru dalam pelayanan perizinan.

## 1.3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### *a. Tugas Pokok*

Tugas Pokok DPMPTSP Kabupaten Kediri adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

### *b. Fungsi*

Dalam melaksanakan tugas pokoknya DPMPTSP Kabupaten Kediri, mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu;
b. penyusunan perencanaan program dan anggaran di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
c. pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu;
d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
e. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. pembinaan penyelenggaraan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu;
g. pelaksanaan administrasi di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu Pintu;
h. penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan perundang-undangan.

## 1.4. LANDASAN HUKUM

1. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
5. Peraturan Bupati Kediri Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja dan Perjanjian Kinerja;
6. Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri;
7. Keputusan Bupati Kediri Nomor Tahun 188.45/113/418.08/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Kediri dan Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Kediri;
8. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri Nomor: 188/ 3853 /418.27/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Tahun 2021 - 2026 Pemerintah Kabupaten Kediri.

## 1.5. SISTEMATIKA PELAPORAN

**BAB I : Pendahuluan**,

Menguraikan Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Mandat yang diberikan kepada instansi, peran strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

**BAB II : Perencanaan Kinerja,**

Pada bab ini diuraikan mengenai hubungan RPJMD dan Renstra, *Cascading* dan Perjanjian Kinerja dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025.

**BAB III : Akuntabilitas Kinerja,**

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2025, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

**BAB IV: Penutup**

Berisi simpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

**Lampiran-Lampiran**

## 1.6. PERMASALAHAN STRATEGIS

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri dihadapkan pada beberapa permasalahan, antara lain :

1. Adanya Keterbatasan sumber daya DPMPTSP dengan peningkatan kualitas pelayanan dalam menciptakan kondisi kenyamanan pelayanan kepada masyarakat dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan perlu didukung dengan sarana prasarana yang memadai;
2. Sumber daya manusia yang terbatas baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sehingga menimbulkan adanya ketidakseimbangan antara pegawai dan beban kerja;
3. Masih terbatasnya wawasan pengetahuan terkait dengan peraturan – peraturan yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi;
4. Masih belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan perizinan secara online, baik dari Online Single Submission (OSS) maupun Kediri Satu Pintu (KESATU);

5. Keterbatasan sumber anggaran dan pengelolaan anggaran yang belum sepenuhnya berbasis;
6. Pengembangan Mall Pelayanan Publik (MPP);
7. Penyusunan *Investment Project Ready to Offer* (IPRO).

# BAB II
# PERENCANAAN KINERJA

Untuk mewujudkan Visi dan Misi serta Sasaran yang telah ditetapkan, perlu disusun suatu strategi agar apa yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Sebelum menentukan strategi yang akan dipakai untuk mencapai tujuan, perlu dilakukan analisa yang matang dan akurat terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal dengan menggunakan Analisa SWOT yang meliputi: *Kekuatan (Strenghts), Kelemahan (Weakness), Peluang (Opportunities), dan Tantangan (Threats)* yang ada.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, diharapkan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat merencanakan dengan baik strategi dan langkah-langkah yang harus diambil untuk menjawab tantangan ke depan, terutama strategi dan langkah dalam mengatasi kelemahan dan tantangan yang akan dihadapi. Selain itu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu harus memprioritaskan program dan kegiatan yang benar-benar dapat direalisasikan serta membawa manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat, serta memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.

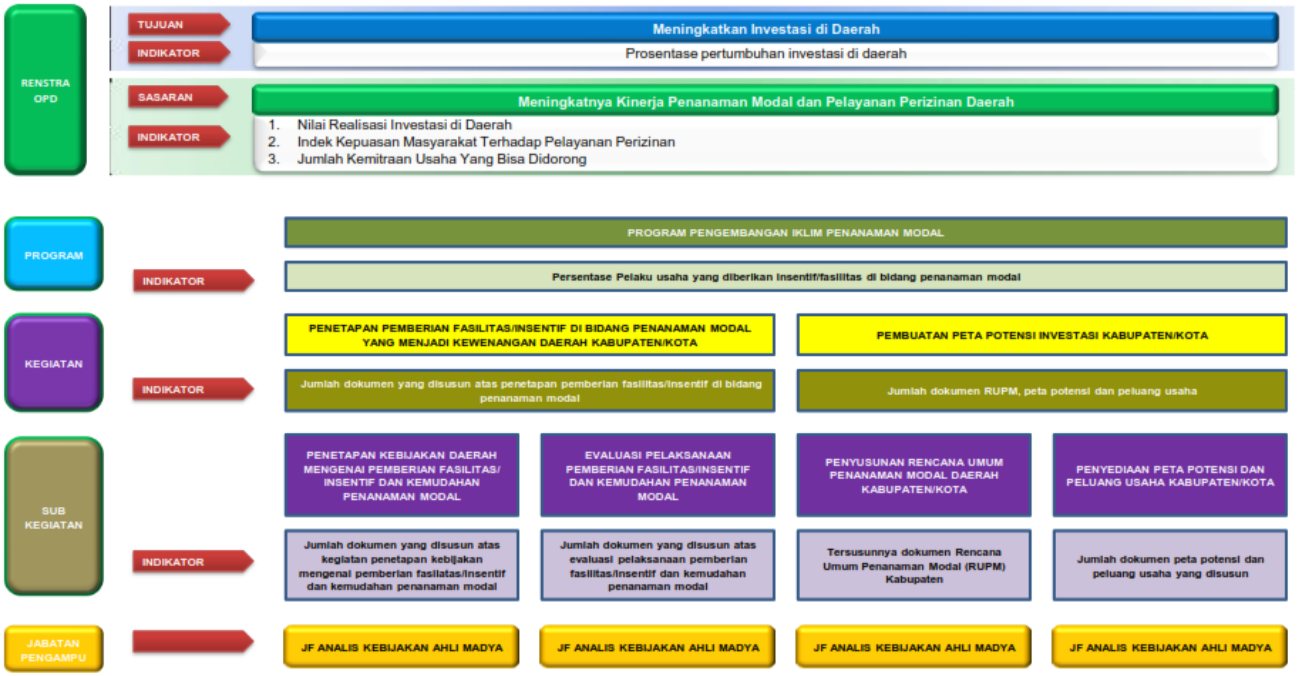
## 2.1 CASCADING KINERJA

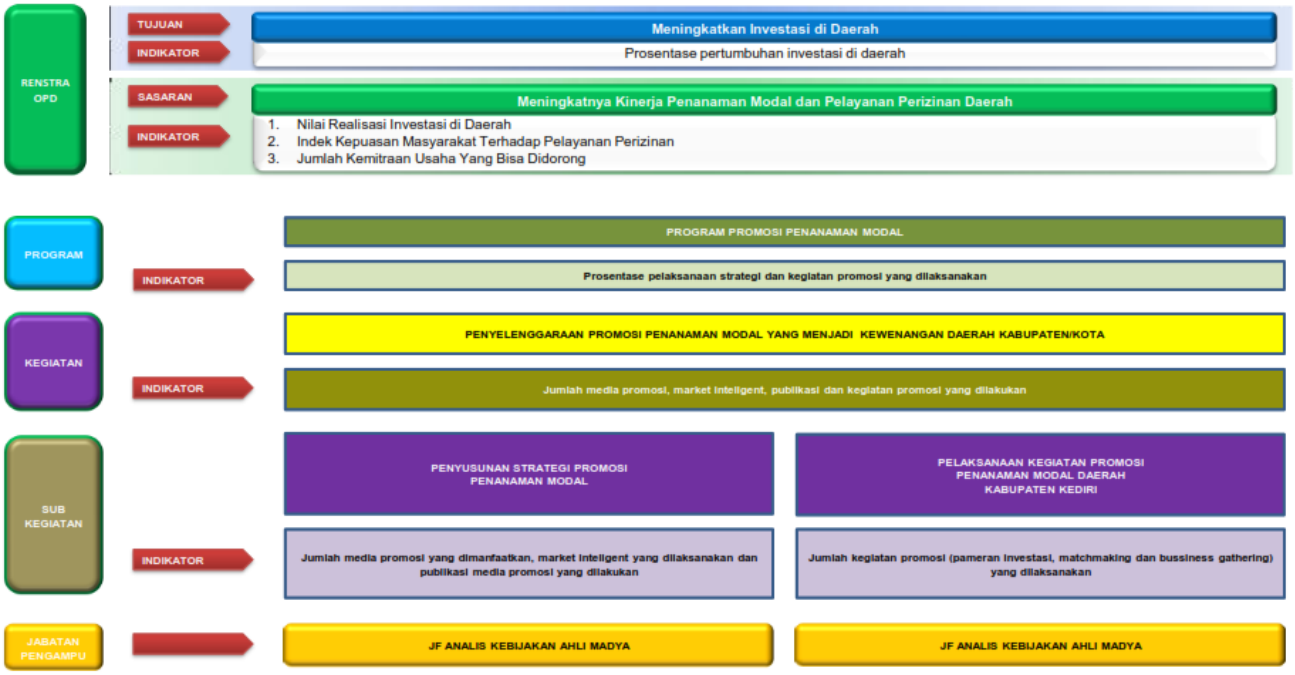
*Cascading* Kinerja digunakan untuk mengetahui dukungan kinerja dari Perangkat Daerah menuju kinerja Pemerintah Daerah. Peran dan dukungan ini digunakan untuk mengetahui peran dan tanggung-jawab Pemerintah Daerah. Cascading dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

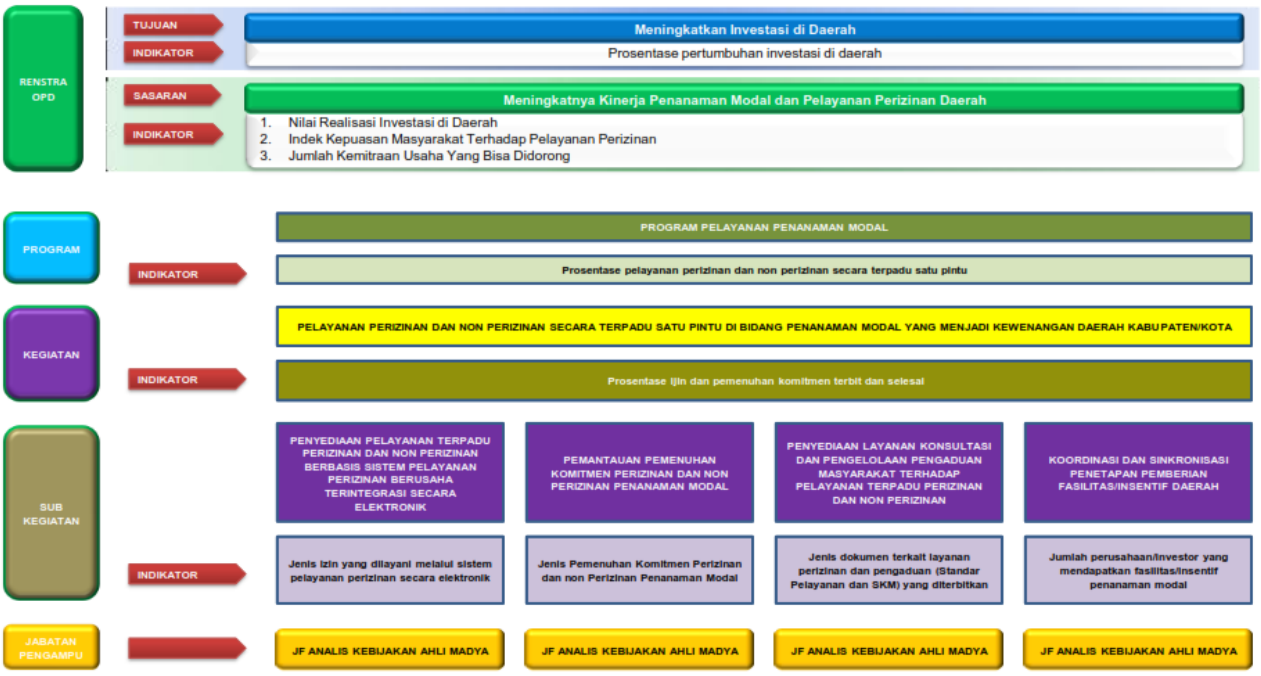
## CASCADING DPMPTSP KABUPATEN KEDIRI

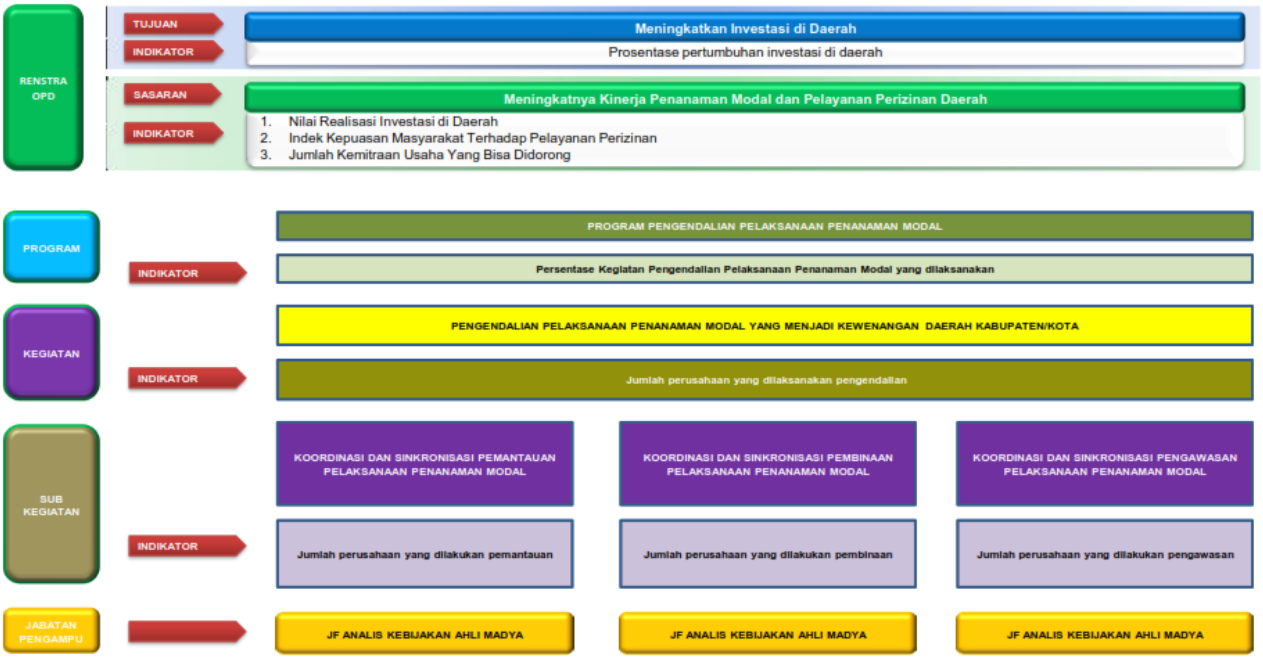
**Misi 3 : Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi Daerah**

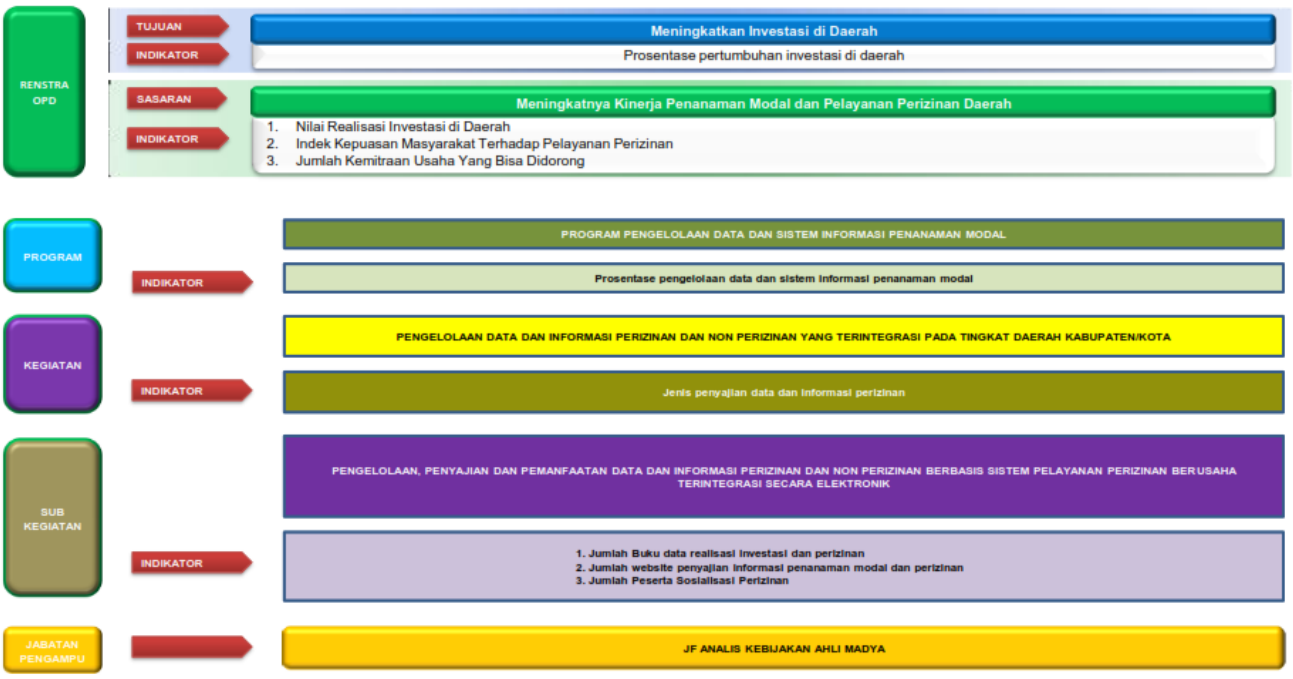



RENSTRA OPD
TUJUAN
Meningkatkan Investasi di Daerah
INDIKATOR
Prosentase pertumbuhan investasi di daerah
SASARAN
Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah
INDIKATOR
1. Nilai Realisasi Investasi di Daerah
2. Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
3. Jumlah Kemitraan Usaha Yang Bisa Didorong
PROGRAM
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL
INDIKATOR
Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan
KEGIATAN
PENYELENGGARAAN PROMOSI PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR
Jumlah media promosi, market intelligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan
SUB KEGIATAN
PENYUSUNAN STRATEGI PROMOSI PENANAMAN MODAL
PELAKSANAAN KEGIATAN PROMOSI PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN KEDIRI
INDIKATOR
Jumlah media promosi yang dimanfaatkan, market intelligent yang dilaksanakan dan publikasi media promosi yang dilakukan
Jumlah kegiatan promosi (pameran investasi, matchmaking dan bussiness gathering) yang dilaksanakan
JABATAN PENGAMPU
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA


RENSTRA OPD
TUJUAN
Meningkatkan Investasi di Daerah
INDIKATOR
Prosentase pertumbuhan investasi di daerah
SASARAN
Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah
INDIKATOR
1. Nilai Realisasi Investasi di Daerah
2. Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
3. Jumlah Kemitraan Usaha Yang Bisa Didorong
PROGRAM
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL
INDIKATOR
Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu
KEGIATAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN SECARA TERPADU SATU PINTU DI BIDANG PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
INDIKATOR
Prosentase Ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai
SUB KEGIATAN
PENYEDIAAN PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
PEMANTAUAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PENANAMAN MODAL
PENYEDIAAN LAYANAN KONSULTASI DAN PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN TERPADU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENETAPAN PEMBERIAN FASILITAS/INSENTIF DAERAH
INDIKATOR
Jenis Izin yang dilayani melalui sistem pelayanan perizinan secara elektronik
Jenis Pemenuhan Komitmen Perizinan dan non Perizinan Penanaman Modal
Jenis dokumen terkait layanan perizinan dan pengaduan (Standar Pelayanan dan SKM) yang diterbitkan
Jumlah perusahaan/investor yang mendapatkan fasilitas/insentif penanaman modal
JABATAN PENGAMPU
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA


RENSTRA OPD
TUJUAN
INDIKATOR
Meningkatkan Investasi di Daerah
Prosentase pertumbuhan investasi di daerah
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah
1. Nilai Realisasi Investasi di Daerah
2. Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
3. Jumlah Kemitraan Usaha Yang Bisa Didorong
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan
KEGIATAN
INDIKATOR
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL YANG MENJADI KEWENANGAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian
SUB KEGIATAN
INDIKATOR
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PEMBINAAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
KOORDINASI DAN SINKRONISASI PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL
Jumlah perusahaan yang dilakukan pemantauan
Jumlah perusahaan yang dilakukan pembinaan
Jumlah perusahaan yang dilakukan pengawasan
JABATAN PENGAMPU
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA


RENSTRA OPD
TUJUAN
INDIKATOR
Meningkatkan Investasi di Daerah
Prosentase pertumbuhan investasi di daerah
SASARAN
INDIKATOR
Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Daerah
1. Nilai Realisasi Investasi di Daerah
2. Indek Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan
3. Jumlah Kemitraan Usaha Yang Bisa Didorong
PROGRAM
INDIKATOR
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL
Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal
KEGIATAN
INDIKATOR
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG TERINTEGRASI PADA TINGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
Jenis penyajian data dan informasi perizinan
SUB KEGIATAN
INDIKATOR
PENGELOLAAN, PENYAJIAN DAN PEMANFAATAN DATA DAN INFORMASI PERIZINAN DAN NON PERIZINAN BERBASIS SISTEM PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA TERINTEGRASI SECARA ELEKTRONIK
1. Jumlah Buku data realisasi investasi dan perizinan
2. Jumlah website penyajian informasi penanaman modal dan perizinan
3. Jumlah Peserta Sosialisasi Perizinan
JABATAN PENGAMPU
JF ANALIS KEBIJAKAN AHLI MADYA

## 2.2 RENCANA STRATEGIS

### 2.2.1 VISI DAN MISI

***Pernyataan Visi***

Visi adalah pernyataan mengenai keadaan di masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu organisasi. Visi organisasi yang ditetapkan mesti menjadi visi bersama (*shared vision*) sehingga dapat membangun komitmen dan menggerakkan segala sumber daya organisasi, menciptakan makna bagi kehidupan anggota organisasi, menciptakan standar/tolok ukur keunggulan, dan menjembatani keadaan sekarang dan masa depan.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33, mengamanatkan agar pembangunan ekonomi harus berdasarkan prinsip demokrasi dan ekonomi kerakyatan sehingga pengembangan penanaman modal bagi usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi harus menjadi bagian dari kebijakan dasar penanaman modal.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, dinyatakan bahwa Visi Kabupaten Kediri adalah "**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, serta Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang Didukung Birokrasi yang Melayani."**

Selanjutnya Visi tersebut diatas dijabarkan ke dalam Misi Pembangunan sebagai berikut :

1. Pengembangan sumber daya manusia yang berkarakter nasionalis-religius;
2. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik;
3. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi di daerah;
4. Revitalisasi pertanian untuk ketahanan dan swasembada pangan;
5. Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar-wilayah;
6. Optimalisasi kepariwisataan berbasis kearifan lokal;
7. Optimasi tata kelola lingkungan hidup, sumber daya alam dan mitigasi bencana;
8. Pengembangan seni, budaya, olahraga dan kreativitas pemuda;

9. Perwujudan kemandirian desa untuk kesejahteraan masyarakat.

Dari kesembilan misi tersebut, DPMPTSP mengemban misi ke-3 yaitu ***"Pengembangan ekonomi kerakyatan dan peningkatan investasi di daerah".***

### 2.2.2 TUJUAN DAN SASARAN

***Tujuan***

Berdasarkan misi yang diemban, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai selama 5 (lima) tahun ke depan yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra). Adapun **tujuan RPJMD,** adalah: Meningkatkan daya saing sektor ekonomi daerah, dan dioperasionalkan ke dalam sasaran. Adapun **Sasaran RPJMD,** adalah Meningkatnya investasi di daerah.

Selanjutnya pada tataran SKPD, Sasaran RPJMD menjadi acuan penetapan Tujuan Renstra SKPD. Adapun **Tujuan Renstra DPMPTSP** adalah: Meningkatkan Investasi di daerah.

***Sasaran***

Selanjutnya tujuan Renstra DPMPTSP dioperasionalkan ke dalam **Sasaran Renstra,** yaitu: Meningkatnya kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah, dengan 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu Nilai Realisasi Investasi di Daerah, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan dan Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong. Berikut indikator kinerja tujuan (sasaran RPJMD) dan sasaran beserta formulasinya :

**Tabel 2.2.2 a**
**Indikator Tujuan dan Sasaran DPMPTSP**

| Tujuan | Sasaran | Indikator | Target Kinerja | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Meningkatkan investasi di daerah | | Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah | 3% | 5% | 6% | 7% | 8% | 9% |
| | Meningkatnya kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah | Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah) | 533365,64 | 694396,06 | 736059,82 | 787584,01 | 850590,73 | 927143,90 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan | 76 | 79,60 | 79,65 | 79,70 | 79,75 | 79,80 |
| | | Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong | - | 1 MoU | 1 MoU | 1 MoU | 1 MoU | 1 MoU |

**Tabel 2.2.2 b**
**Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Tujuan DPMPTSP**

| Indikator Kinerja | Rumus/ Formula Indikator | Sumber Data (Perangkat Verifikasi) |
|---|---|---|
| Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah | $\frac{\text{Nilai Investasi Tahun n – Nilai Investasi Tahun n-1}}{\text{Nilai Investasi Tahun n-1}}$ X 100% | Laporan LKPM dan Laporan Realisasi Investasi Mikro (https://oss.go.id/) |

Keterangan :

- Nilai Realisasi Investasi = Perkembangan realisasi investasi tahun n
- Nilai Investasi = Jumlah Akumulasi dari tahun sebelumnya
- Pada Perhitungan Nilai Investasi, untuk Investasi Non Fasilitas tidak diakumulasikan/realisasi investasi Non Fasilitas pada tahun berjalan saja.

**Tabel 2.2.2 c**
**Formula Pengukuran dan Perhitungan Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP**

| Indikator Kinerja | Rumus/ Formula Indikator | Sumber Data (Perangkat Verifikasi) |
|---|---|---|
| Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah) | Nilai Realisasi Investasi | Laporan LKPM dan Laporan Realisasi Investasi Mikro (https://oss.go.id/) |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan | Capaian IKM | Rata-rata Hasil Laporan SKM Tahun-n |
| Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong | jumlah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang dituangkan dalam dokumen formal | Dokumen Mou/ Kerjasama |

### 2.2.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026 menjadi acuan dasar bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2021 – 2026. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut diatas, maka disusun beberapa Strategi antara lain:

1. Mendorong dan mengembangkan iklim usaha yang kondusif bagi pertumbuhan investasi;
2. Meningkatkan pelaksanaan pengendalikan penanaman modal berdasarkan sektor usaha dan wilayah;
3. Meningkatkan pelaksanaan promosi investasi kepada investor;
4. Meningkatkan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal;
5. Meningkatkan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk meningkatkan investasi di Kabupaten Kediri, ditetapkan beberapa Kebijakan yang telah dan akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, antara lain:

1. Penyusunan deregulasi atau kebijakan penanaman modal serta didukung lingkungan birokrasi yang kondusif bagi investasi;
2. Penyusunan rencana umum, rencana strategis dan rencana pengembangan penanaman modal berdasarkan potensi investasi daerah;
3. Peningkatan fungsi pengendalian penanaman modal, yang meliputi pemantauan, pembinaan, dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal;
4. Peningkatan kegiatan promosi dan media promosi investasi yang lebih fokus, terarah dan inovatif, serta meningkatkan koordinasi promosi dengan instansi terkait;
5. Pembangunan, pengembangan dan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal serta penyajian informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah;

6. Peningkatan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang menjadi kewenangan daerah berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.

Dengan dilaksanakannya strategi dan kebijakan di atas, diharapkan terwujudnya Kabupaten Kediri sebagai daerah tujuan investasi yang menarik bagi investor dan sebagai mitra terbaik bagi pengembangan usaha yang di dukung dengan pelayanan yang profesional, dapat tercapai dengan baik. Selanjunya, dengan adanya peningkatan dan perkembangan Penanaman Modal di daerah diharapkan tingkat perekonomian dan pendapatan masyarakat di Kabupaten Kediri juga dapat ditingkatkan.

Namun dalam rangka mewujudkan visi tersebut bukanlah hal yang mudah, perlu adanya upaya yang serius dan partisipasi dari semua pihak, baik pemerintah, swasta dan semua lapisan masyarakat. Hal ini disebabkan karena untuk menarik investor ke daerah diperlukan proses yang cukup panjang serta dukungan dari semua pihak.

## 2.3 PERJANJIAN KINERJA

Pada tahun 2025, Kepala DPMPTSP Kabupaten Kediri telah menyepakati Sasaran, Indikator dan Target kinerja dengan Bupati Kediri. Terdapat beberapa penyesuaian dalam penyusunan Perjanjian Kinerja ini, terutama sesuai dengan arahan dan rekomendasi dari Kementerian PANRB untuk mengganti target apabila realisasi tahun sebelumnya telah melampaui target tahun berikutnya dalam Renstra menjadi lebih realistis yakni dengan meningkatkan (lebih tinggi) atau mempertahankan (sama) dengan realisasi tahun sebelumnya. Selain hal tersebut, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sebagai penyelarasan ulang atas Perubahan Anggaran Kerja (PAK), Pergantian atau mutasi Pejabat, Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran, perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran, serta hal-hal lain yang diatur dalam PermenPANRB 53 Tahun 2014. Adapun Perjanjian Kinerja Perubahan DPMPTSP adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.3.**
**Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025**

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target |
|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah | Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah) | 1.541.237,28 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan | 88,13 |
| | | Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong | 3 Mou |

## 2.4 RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, maka ditetapkanlah Program dan Anggaran yang akan dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri pada Tahun Anggaran 2025, terdiri atas 6 (enam) program, dan yang selanjutnya dirinci ke dalam 13 (tiga belas) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, sebagai berikut:

**Tabel 2.4 a**
**Program dan Kegiatan Tahun 2025**

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Jumlah Dana | Outcome/Output |
|---|---|---|---|
| **I.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Rp. 6.414.198.865** | **Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |
| *1* | *Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | *Rp. 441.800* | *Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Rp. 154.200 | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Rp. 143.800 | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Rp. 143.800 | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |
| *2* | *Administrasi Keuangan Perangkat Daerah* | *Rp. 5.096.246.003* | *Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah* |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Rp. 4.359.025.700 | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Rp. 737.146.303 | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Jumlah Dana | Outcome/Output |
|---|---|---|---|
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Rp. 74.000 | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD |
| *3* | *Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah* | *Rp. 143.800* | *Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah* |
| | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | *Rp.* 143.800 | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD |
| *4* | *Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* | *Rp. 111.000.000* | *Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah* |
| | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Rp. 111.000.000 | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan |
| *5* | *Administrasi Umum Perangkat Daerah* | *Rp. 989.040.633* | *Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah* |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Rp. 1.497.600 | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 925.829.933 | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |
| | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Rp. 9.432.000 | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |
| | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Rp. 3.415.700 | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Rp. 8.902.400 | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Rp. 39.963.000 | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |
| *5* | *Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Rp. 186.326.629* | *Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan* |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Rp. 5.750.000 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Rp. 134.856.629 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |
| | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Rp. 45.720.000 | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Jumlah Dana | Outcome/Output |
|---|---|---|---|
| *6* | *Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah* | *Rp. 31.000.000* | *Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara* |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Rp. 31.000.000 | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |
| **II.** | **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | **Rp. 263.877.800** | **Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal** |
| *7* | *Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | *Rp. 69.082.800* | *Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal* |
| | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Rp. 46.017.800 | Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal |
| | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Rp. 23.065.000 | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah |
| *8* | *Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota* | *Rp. 194.795.000* | *Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun* |
| | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 5.476.500 | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota |
| | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Rp. 189.318.500 | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota |
| **III.** | **Program Promosi Penanaman Modal** | **Rp. 166.287.300** | **Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan** |
| *9* | *Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | *Rp. 166.287.300* | *Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan* |
| | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Rp. 157.194.300 | Jumlah kegiatan promosi (pameran investasi, matchmaking dan bussiness gathering) yang dilaksanakan |
| | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Rp. 9.093.000 | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota |
| **IV.** | **Program Pelayanan Penanaman Modal** | **Rp. 519.547.000** | **Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu** |
| *10* | *Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman* | *Rp. 519.547.000* | *Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai* |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Jumlah Dana | Outcome/Output |
|---|---|---|---|
| | *Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota* | | |
| | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Rp. 461.147.000 | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |
| | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko | Rp. 58.400.000 | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |
| **V.** | **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | **Rp. 275.886.200** | **Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan** |
| *11* | *Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota* | *Rp. 275.886.200* | *Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian* |
| | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Rp. 23.548.300 | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |
| | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Rp. 161.127.600 | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko |
| | Pengawasan Penanaman Modal | Rp. 91.210.300 | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha |
| **VI.** | **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | **Rp. 105.793.040** | **Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal** |
| *12* | *Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota* | *Rp. 105.793.040* | *Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan* |
| | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan | Rp. 105.793.040 | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |

| No | Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan | Jumlah Dana | Outcome/Output |
|---|---|---|---|
| | Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | | yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan |
| **TOTAL** | | **Rp. 7.745.590.205** | |

Dengan adanya program dan kegiatan tersebut diatas diharapkan apa yang menjadi Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri yang tertuang dalam RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dapat tercapai dengan baik.

# BAB III
# AKUNTABILITAS KINERJA

## 3.1 PENGUKURAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja Organisasi disampaikan dengan Capaian Kinerja Utama, Capaian Anggaran, Efisiensi Sumber Daya, Perbandingan Realisasi Tahun Sebelumnya, Perbandingan Target RPJMD, dan *(Benchmarking)*.

### 3.1.1 Capaian Kinerja Utama Organisasi

Akuntabilitas Kinerja adalah suatu bentuk perwujudan kewajiban sekaligus merupakan instrument untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam mekanisme pengelolaan birokrasi/pemerintahan, akuntabilitas kinerja merupakan suatu kewajiban mutlak yang harus dilaksanakan oleh suatu instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah dilaksanakan oleh suatu instansi Pemerintah bersangkutan selama satu tahun anggaran.

Pengukuran akuntabilitas kinerja diawali dengan adanya penetapan sasaran strategis yang hendak dicapai. Adapun sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, adalah "Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah". Pengukuran pencapaian sasaran tersebut dicapai dengan menggunakan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.1.1 a**

**Capaian Indikator Tujuan DPMPTSP Kabupaten Kediri (Sasaran RPJMD)**

| TUJUAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | INFORMASI KINERJA | | REALISASI | CAPAIAN (%) | DATA DUKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatkan investasi di daerah | Prosentase pertumbuhan investasi di daerah | 29.99% | Nilai Investasi Tahun 2025- Nilai investasi th 2024/ Nilai investasi th 2024 x 100% | - Nilai Investasi Tahun 2024 sebesar Rp. 4.636.215.436.458<br>- Nilai Investasi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.688.461.116.537 | (1.688.461.116.537-4.636.215.436.458)/ 4.636.215.436.458 x 100% = **-63,58%** | -212,00% | Laporan Realisasi Investasi DPMPTSP |

**Tabel 3.1.1 b**
**Capaian Indikator Kinerja Sasaran DPMPTSP Kabupaten Kediri**
**(Sasaran Renstra)**

| SASARAN RENSTRA | IKU | TARGET | INFORMASI KINERJA | | REALISASI | CAPAIAN (%) | DATA DUKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah | Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah) | 1.541.237,28 | Nilai Realisasi Investasi | - Nilai Investasi Tahun 2025 sebesar Rp. 1.688.461.116.537 | **Rp. 1.688.461,12** | 109,55% | Laporan Realisasi Investasi DPMPTSP |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan | 88,13 | Capaian IKM | Nilai SKM sebesar 89.52 dari 88,13 | **89.52** | 101,58% | Laporan IKM DPMPTSP |
| | Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong | 3 Mou | Dokumen Pernyataan Minat | | **3 Mou/ Pernyataan Minat** | 100,00% | Berita Acara |

Dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama tersebut diatas, secara berjenjang didukung oleh indikator-indikator kinerja pada tingkat program dan beberapa indikator kinerja pada tingkat kegiatan/ sub kegiatan. Capaian indikator kinerja program pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1 c**
**Capaian Kinerja Program DPMPTSP Kabupaten Kediri**

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | INFORMASI KINERJA | | REALISASI | CAPAIAN (%) | DATA DUKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Terwujudnya daya tarik investasi dan dunia usaha di Kabupaten Kediri | Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal | 25% | Jumlah pelaku usaha yang diberikan insentif/kemudahan/ Jumlah pelaku usaha yang memenuhi persyaratan untuk diberikan insentif/kemudahan x 100% | | 75% | 300 | |
| Terwujudnya minat investasi melalui promosi bagi calon investor | Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan | 100% | Jumlah kegiatan promosi yang dilaksanakan / Jumlah kegiatan promosi yang ditargetkan x 100% | | 100% | 100 | Laporan |

| SASARAN PROGRAM | INDIKATOR KINERJA | TARGET | INFORMASI KINERJA | | REALISASI | CAPAIAN (%) | DATA DUKUNG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | |
| Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan | Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu | 100% | Jumlah izin yang diterbitkan/ Jumlah yang masuk x100% | | 100% | 100 | |
| Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal | Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan | 83% | Jumlah realisasi perusahaan yang dilakukan kegiatan pengendalian penanaman modal/ Jumlah target perusahaan yang dilakukan kegiatan pengendalian penanaman modal x 100% | | 100% | 119.05 | |
| Terwujudnya kemudahan akses informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan modal | Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | 100% | Jumlah pengelolaan data & sistem informasi yang dilaksanakan/ Jumlah pengelolaan data & sistem informasi yang ditargetkan x 100% | | 100% | 100% | |
| Terwujudnya cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota | Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | Jumlah realisasi kinerja program/ Jumlah target kinerja program x 100% | | 100% | 100,00 | |

Selanjutnya, untuk mencapai indikator kinerja program tersebut diatas, secara berjenjang didukung oleh indikator kinerja pada tingkat kegiatan. Indikator kinerja kegiatan pada DPMPTSP adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.1.1 d**
**Capaian Kinerja Kegiatan DPMPTSP Kabupaten Kediri**

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|
| Tersedianya Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat | 10 Laporan | 10 Laporan | 100,00 |

| SASARAN KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) |
|---|---|---|---|---|
| | Daerah | | | |
| Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00 |
| Tersedianya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00 |
| Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100,00 |
| Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100,00 |
| Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan | 100% | 100% | 100,00 |
| Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | 4 unit | 4 unit | 100,00 |
| Terselenggaranya kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal | 2 dokumen | 2 dokumen | 100,00 |
| Tersedianya dokumen data Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun | 2 dokumen | 2 dokumen | 100,00 |
| Terselenggaranya Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100,00 |
| Tersedianya Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai | 79% | 99,56% | 126,03 |
| Terselenggaranya Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian | 405 perusahaan | 407 Perusahaan | 100,49 |
| Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan | 2 Jenis (buku, publikasi) | 2 Jenis (buku, publikasi) | 100,00 |
| | | | | |
| ***= data sementara*** | | | | |

**Evaluasi Dan Analisis Capaian Kinerja Sub Kegiatan**

Evaluasi dan analisis kinerja kegiatan adalah analisa yang dilakukan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilakukan pada Tahun 2025 guna mengetahui tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan dari pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan tersebut dibuat target-target pada masing-masing kegiatan dan selanjutnya setelah satu tahun berjalan akan diukur hasilnya berdasarkan realisasi yang terlaksana.

**1. Evaluasi Hasil dan Kinerja Input, Output dan Outcome**

Dalam kurun waktu Tahun Anggaran 2025, sebanyak *6* (enam) Program dan 13 (tiga belas) kegiatan dan 30 (tiga puluh) sub kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun rincian evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan dimaksud adalah sebagai berikut:

**1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**, Program ini merupakan program rutin urusan kesekretariatan dinas untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan di tingkat kabupaten/kota agar lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

a. ***Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah****,* sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 441.800, output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 10 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 341.000 atau sebesar 77,18% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 10 laporan (Renja Tahun 2026, Perubahan Renja 2025, IKK 2024, LKPJ 2024, Dokumen RB, LKjIP 2024, Monev Triwulan I, II, III, IV Tahun 2025) atau sebesar 100,00%. Adanya sisa anggaran karena efisiensi belanja kegiatan. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah**, Tujuan sub kegiatan ini untuk menciptakan sebuah pedoman yang jelas, terstruktur, dan terukur bagi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah. Dokumen perencanaan ini menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam mengarahkan program, kegiatan, dan alokasi sumber daya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 154.200, output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah sebanyak 2 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 125.000 atau sebesar 81,06% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 dokumen (Renja Tahun 2026 dan Perubahan Renja 2025) atau sebesar 100,00%;
2. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD**, tujuan sub kegiatan ini penyusunan laporan kinerja disusun secara terintegrasi dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah sehingga mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efektif. sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 143.800, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD sebanyak 2 laporan.
   Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 108.000 atau sebesar 75,10% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 dokumen (IKK tahun 2024 dan LKPJ Tahun 2024) atau sebesar 100,00%;

3. **Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**, tujuan adanya sub kegiatan ini adalah untuk menilai sejauh mana perangkat daerah telah melaksanakan tugas, fungsi, dan programnya sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi kinerja ini dilakukan untuk memastikan bahwa perangkat daerah bekerja secara efektif, efisien, dan akuntabel dalam mencapai tujuan pembangunan daerah, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 143.800, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebanyak 6 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 108.000 atau sebesar 75,10% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 6 dokumen (Dokumen RB, LKjIP 2024, Monev Triwulan I, II, III, IV) atau sebesar 100,00%.

b. ***Administrasi Keuangan Perangkat Daerah***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 4.049.738.815, output kegiatan yaitu Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah sebanyak 3 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 3.869.040.434 atau sebesar 95,54% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 3 dokumen atau sebesar 100,00%. Adanya sisa anggaran karena efisiensi belanja kegiatan, sisa gaji dan tunjangan. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN**, tujuan adanya sub kegiatan ini adalah penyedian gaji dan tunjangan untuk ASN, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.096.246.003, output sub kegiatan yaitu Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 23 Orang/bulan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 4.436.932.267 atau sebesar 87,06% dengan realisasi sub kegiatan (output) 32 orang/bulan atau sebesar 87,06%;

2. **Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**, Penyediaan administrasi ini mencakup berbagai aspek yang mendukung kinerja ASN, mulai dari pengelolaan kepegawaian, pembinaan, hingga fasilitas pendukung, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 737.146.303, output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN sebanyak 12 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 679.913.284 atau sebesar 92,24% dengan realisasi sub kegiatan (output) selama 12 dokumen atau sebesar 100,00%;
3. **Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD**, tujuan sub kegiatan ini untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Laporan keuangan ini menjadi alat pertanggungjawaban SKPD atas penggunaan anggaran yang telah dialokasikan selama satu tahun anggaran, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 74.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD sebanyak 1 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 73.200 atau sebesar 98,92% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 laporan (laporan keuangan tahun 2024) atau sebesar 100,00%.

c. ***Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 143.800, output kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 120.000 atau sebesar 83,45% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 laporan atau sebesar 100,00%. Adanya sisa anggaran karena efisiensi belanja kegiatan. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD**, tujuan sub kegiatan ini penatausahaan barang milik daerah mencakup kegiatan pencatatan, pengelolaan, pemeliharaan, dan pelaporan barang-barang yang dimiliki oleh daerah sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 143.800, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD sebanyak 2 laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 120.000 atau sebesar 83,45% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 laporan atau sebesar 100,00%.

d. ***Administrasi Umum Perangkat Daerah***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 989.040.633, output kegiatan yaitu Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar 100%.

Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 971.281.751 atau sebesar 98,20% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 100%. Adanya sisa anggaran karena efisiensi belanja kegiatan. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor**, tujuan sub kegiatan ini untuk memastikan bahwa bangunan kantor memiliki sistem listrik dan penerangan yang memadai, aman, dan efisien, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 1.497.600, output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan sebanyak 1 paket. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 1.497.600 atau sebesar 100,00% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 paket atau sebesar 100,00%;
2. **Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, tujuan sub kegiatan ini adalah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor berupa belanja modal. Focus belanja modal tahun 2025 untuk mencukupi kebutuhan sarana prasarana Mal Pelayanan Publik (MPP), sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 925.829.933, output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 5 paket. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 908.382.986 atau sebesar 98,12% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 5 paket (1 paket genset 100 KVA dan instalasinya, 1 set CCTV Ruang Pelayanan, 1 unit Digital Signage 55", 20 unit Papan Nama, 1 unit Tablet Samsung, 13 unit UPS Spesifikasi: 1.100VA, 42 buah Kursi hadap, 20 buah Meja kerja, 1 set Set Meja Rapat Uk 600 x 150x 75 plus 25 kursi, 2 unit Dispenser Air, 3 unit Komputer PC, 3 buah Printer, 1 unit internet satelite) atau sebesar 100,00%;

3. **Penyediaan Peralatan Rumah Tangga**, bertujuan pemenuhan kebutuhan peralatan yang mendukung kegiatan operasional dan kenyamanan dalam lingkungan rumah tangga skpd, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 9.432.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan sebanyak 3 Paket. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 9.160.000 atau sebesar 97,12% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 3 Paket (Spanduk, Banner, Bendera, Karangan Bunga) atau sebesar 100,00%;
4. **Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan**, sub kegiatan ini bertujuan menyediakan produk cetak dan dokumen yang diperlukan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 3.415.700, output sub kegiatan yaitu Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan sebanyak 3 Paket. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 3.401.600 atau sebesar 99,59% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 3 Paket atau sebesar 100,00%;
5. **Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan**, sub kegiatan ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan literasi/ bahan bacaan, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.902.400, output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan sebanyak 12 Dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 8.900.400 atau sebesar 99,98% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 12 Dokumen atau sebesar 100,00%;

6. **Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD**, sub kegiatan ini bertujuan mendukung kegiatan forum untuk berdiskusi, bertukar informasi, dan berkonsultasi mengenai isu-isu strategis, tantangan, dan solusi dalam pelaksanaan tugas (berupa makanan dan minuman), sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 39.963.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sebanyak 12 Laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 39.939.165 atau sebesar 99,94% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 12 Laporan atau sebesar 100,00%.

e. ***Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 186.326.629, output kegiatan yaitu Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan sebesar 100%. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 130.607.813 atau sebesar 70,10% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 100,00%. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**, sub kegiatan ini bertujuan menyediakan layanan surat menyurat yang diperlukan untuk mendukung kegiatan administrasi dan operasional sehari-hari, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.750.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebanyak 12 Laporan.

   Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 5.132.500 atau sebesar 89,26% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 12 Laporan atau sebesar 100,00%;

2. **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**, sub kegiatan ini bertujuan penyediaan listrik, jaringan internet dan telepon untuk operasional kantor, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 134.856.629, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan sebanyak 12 Laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 79.859.163 atau sebesar 59,22% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 12 Laporan atau sebesar 100,00%;
3. **Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor**, sub kegiatan ini bertujuan menyediakan jasa servis sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran operasional, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 45.720.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan sebanyak 12 Laporan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 45.616.150 atau sebesar 99,77% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 12 Laporan atau sebesar 100,00%.

f. ***Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 31.000.000 dengan output Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara sebanyak 4 unit. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 30.058.110 atau sebesar 96,96% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 4 unit atau sebesar 100,00%, dengan rincian sebagai berikut:

1. **Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan**, tujuan sub kegiatan ini menyediakan jasa servis kendaraan dinas yang mendukung kelancaran operasional, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 31.000.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya sebanyak 4 unit. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 30.058.110 atau sebesar 96,96% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 4 unit atau sebesar 100,00%;

**2) PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL,** tujuan program ini untuk menciptakan iklim/ lingkungan yang kondusif bagi investasi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 263.877.800, output kegiatan yaitu Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal sebesar 25 % atau 1 pelaku usaha yang difasilitasi. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 254.365.442 atau sebesar 96,40% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 75 % atau 3 (tiga) kesepakatan/MoU antara Pelaku Usaha Besar dengan Usaha Mikro Kecil. Kegiatan pada program ini antara lain :

***a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 69.082.800, output kegiatan yaitu Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal sebanyak 2 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 65.662.542 atau sebesar 95,05% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 dokumen.

Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal**, sub kegiatan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kebijakan yang mendukung iklim investasi yang kondusif di tingkat daerah, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 46.017.800, output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal sebanyak 1 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 45.056.542 atau sebesar 97,91% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 dokumen (sebesar 100,00%) yaitu Draf Perda Penanaman Modal telah dibahas bersama dewan/legislatif, dan menunggu hasil fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
2. **Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota**, sub kegiatan ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya kemitraan usaha yang saling menguntungkan antara pelaku usaha besar, usaha menengah, dan UMKM, sehingga tercipta rantai pasok yang inklusif dan berkelanjutan, sumber anggaran sub

kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 23.065.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal sebanyak 1 dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 20.606.000 atau sebesar 89,34% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 3 dokumen (sebesar 300,00%) yaitu:

- Kegiatan Kemitraan Berusaha, diantaranya:
  a. REI dengan PT Sinar Kediri Sakti, PT Globalindo Furniture, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kediri, mencakup kegiatan kerjasama Akses Pemasaran Perumahan dan Penyediaan Furniture;
  b. LTE CRUISE dengan PT Giandra Bisa Bersama, mencakup kegiatan pelatihan calon tenaga kerja hotel dan kapal pesiar internasional;
  c. Dapur Lansia dan Disabilitas Kepung dengan Nusantara Fres, mencakup kegiatan supply buah pisang cavendish.

***b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 194.795.000, output kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Peta potensi dan peluang usaha yang disusun sebanyak 2 Dokumen.

Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 188.702.900 atau sebesar 96,87% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 Dokumen (sebesar 100,00%). Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**, tujuan sub kegiatan ini adalah untuk menciptakan kerangka perencanaan yang terstruktur dan

terarah dalam menarik, mengelola, dan mengoptimalkan investasi di tingkat kabupaten/kota, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 5.476.500, output sub kegiatan yaitu Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 5.135.000 atau sebesar 93,76% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 Dokumen (sebesar 100,00%) yaitu:

1. Terlaksananya Rapat Koordinasi dengan OPD Dalam Rangka Evaluasi RUPM Kab. Kediri Tahun 2016-2025 dan Rencana Penyusunan RUPM 2025-2045;

2. **Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota**, sub kegiatan ini bertujuan untuk menyediakan informasi yang komprehensif dan terstruktur mengenai peluang dan potensi investasi di tingkat kabupaten/kota, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 189.318.500, output sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota sebanyak 1 Dokumen. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 183.567.900 atau sebesar 96,96% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 1 Dokumen (sebesar 100,00%) yaitu:
   - Kajian Investmen Project Ready to Offer (I-PRO) Industri Pengolahan Biofarma Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Kediri;
   - Pemutakhiran SIDAPOTIK (Sistem Informasi Data Potensi Investasi Terintegrasi Kabupaten Kediri) dengan Berbasis Peta Geospasial

3) **PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL,** program ini bertujuan untuk mempromosikan potensi investasi, keunggulan kompetitif, dan kemudahan yang ditawarkan oleh suatu daerah dengan kegiatan antara lain :

***a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 166.287.300 dengan target output adalah Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan sebanyak 2 kegiatan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 165.395.150 atau sebesar 99,46% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 kegiatan atau sebesar 100,00%. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**, tujuan sub kegiatan ini adalah untuk memperkenalkan potensi investasi yang tersedia di berbagai sektor, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 157.194.300, output sub kegiatan yaitu Jumlah kegiatan promosi ke Pengusaha/Investor yang dilaksanakan sebanyak 2 kegiatan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 156.421.150 atau sebesar 99,51% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 kegiatan (promosi langsung ke perusahaan dan pameran investasi) yaitu:
   - Pameran investasi diantaranya: Pameran Jatim Fest Yang Dilaksanakan Oleh Pemprov Jatim, Pameran Ruang Riang Rakyat di Taman Hijau SLG.
   - Promosi langsung ke perusahaan diantaranya mengikuti EJIF (East Java In Festival) Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPWI Bank Indonesia.

4) **PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL, tujuan** dari program ini adalah mempermudah proses perizinan dan pelayanan dengan kegiatan meliputi :

a. ***Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 519.547.000 dengan target output adalah Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai sebesar 79%. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 486.111.572 atau sebesar 93,56% dengan realisasi kegiatan (output) sebesar 100% (sebesar 128,21%). Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik**, tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perizinan berusaha serta memberikan dukungan dan bimbingan kepada pelaku usaha dalam memahami dan memenuhi persyaratan perizinan berusaha yang sesuai dengan tingkat risiko usahanya, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 461.147.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 10.000 pelaku usaha. Adapun jenis izin yang dilayani merupakan izin usaha yang diproses melalui https://oss.go.id/ dan aplikasi SIMPATIK, sebanyak 11 jenis izin daerah yang dilayani yaitu:
    1) Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKKPR);

2) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Berusaha;
3) Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL);
4) Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH);
5) KKLH;
6) Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) Non Berusaha;
7) Izin Pemasangan Reklame;
8) Izin Pemakaian Kekayaan Daerah;
9) Izin Instalatur Kabel Rumah;
10) Izin Galian untuk Penggelaran Kabel Telekomunikasi;
11) Izin Pengumpulan Barang dan Uang.

Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 428.150.072 atau sebesar 92,84% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 20.747 pelaku usaha (sebesar 207,47%). Pada sub kegiatan ini kegiatan teknis yang dilakukan yaitu:

- Pengembangan aplikasi Kesatu
- Pendampingan izin
- Pelayanan Keliling Joss. Jumlah NIB terbit: 20.747 NIB
- Kegiatan Rutin Untuk ATK, Belanja Cetak, Lembur.

2. **Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko**, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 58.400.000, output sub kegiatan yaitu Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik sebanyak 1000 orang. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 57.961.500 atau sebesar 99.25% dengan realisasi

sub kegiatan (output) sebanyak 1552 orang (sebesar 155,20%).

Pada sub kegiatan ini kegiatan teknis yang dilakukan yaitu: layanan konsultasi perizinan berusaha.

**5) PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL,** Program ini bertujuan untuk menciptakan pengawasan yang efektif dan efisien terhadap investasi yang dilakukan, baik oleh investor domestik maupun asing, meliputi kegiatan sbb :

***a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 275.886.200 dengan target output adalah Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian sebanyak 405 Perusahaan. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 248.223.961 atau sebesar 89,97% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 407 Perusahaan (sebesar 100,49%). Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:

1. **Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya**, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 23.548.300, output sub kegiatan yaitu Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya sebanyak 5 Kegiatan Usaha. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 19.848.300 atau sebesar 84,29% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 7 Kegiatan Usaha yang didampingi dalam pengisian LKPM.

2. **Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha**, tujuan dari sub kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pelaku usaha dalam menjalankan

kegiatan usahanya, serta memastikan bahwa mereka memahami dan mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 161,127,600, output sub kegiatan yaitu Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebanyak 350 pelaku usaha. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 146,501,600 atau sebesar 90,92% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 350 perusahaan (sebesar 100,00%). Pada sub kegiatan ini kegiatan teknis yang dilakukan yaitu:

- Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tahun 2025 sebanyak 2 kali (100 peserta);
- Sosialisasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Peternakan Tahun 2025 sebanyak 2 kali (100 peserta);
- BIOSS 3.0 (bincang online single submission) sebanyak 1 kali (100 peserta);
- Bimbingan Teknis Laporan Kegiatan Penanaman Modal Tahun 2025 sebanyak 1 kali (50 peserta).

3. **Pengawasan Penanaman Modal**, sub kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan penanaman modal berjalan sesuai dengan peraturan, kebijakan, dan tujuan pembangunan yang telah ditetapkan, sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran sebesar Rp. 91.210.300, output sub kegiatan yaitu Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta

Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha sebanyak 50 Kegiatan Usaha. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 81.874.061 atau sebesar 89,76% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 50 Kegiatan Usaha (sebesar 100%).

6. **PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL,** Program ini bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, meningkatkan transparansi, dan memfasilitasi pelayanan yang lebih baik kepada investor meliputi kegiatan sbb :
   a. ***Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota***, sumber anggaran kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 105.793.040 dengan target output adalah Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan sebanyak 4 jenis. Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 105.587.200 atau sebesar 99.81% dengan realisasi kegiatan (output) sebanyak 2 jenis (sebesar 100,00%). Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari sub kegiatan berikut:
      1. **Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**, tujuan sub kegiatan ini adalah untuk memastikan bahwa data dan informasi perizinan berusaha dikelola, disajikan, dan dimanfaatkan secara efektif dan efisien melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis elektronik sumber anggaran sub kegiatan ini dari Dana Alokasi Umum (DAU) dengan nilai anggaran yang disediakan sebesar Rp. 105.793.040, output sub kegiatan yaitu Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan

Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan sebanyak 3 Dokumen.

Dari sejumlah tersebut di atas terealisasi anggaran sebesar Rp. 105.587.200 atau sebesar 99.81% dengan realisasi sub kegiatan (output) sebanyak 2 Dokumen (sebesar 100,00%) yaitu:

- Penyusunan Buku Perizinan dan Investasi Tahun 2024;
- Publikasi Kegiatan dinas melalui media cetak, media sosial DPMPTSP.

Berikut Rekapitulasi Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target pada Rencana Kerja Tahun 2025

**Tabel 3.1.1 e**
**Capaian Kinerja Sub Kegiatan/ Rencana Kerja**
**DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025**

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100%** | **100** |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | 10 Laporan | 100 |
| *1.1* | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| *1.2* | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 laporan | 2 laporan | 100 |
| *1.3* | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen | 6 dokumen | 100 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 3 dokumen | 3 dokumen | 100 |
| *2.1* | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | 32 Orang/ bulan | 139.13 |
| *2.2* | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| *2.3* | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 100 |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 2 laporan | 2 laporan | 100 |
| *3.1* | Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 laporan | 2 laporan | 100 |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100 |
| *4.1* | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 32 Orang | 54 Orang | 168.75 |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100 |
| 5.1 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100 |
| 5.2 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | 100 |
| 5.3 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100 |
| 5.4 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100 |
| 5.5 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100 |
| 5.6 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan | 100% | 100% | 100 |
| *6.1* | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| *6.2* | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Air dan Listrik | Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | | | |
| *6.3* | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | 4 unit | 4 unit | 100 |
| *7.1* | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 unit | 4 unit | 100 |
| **II.** | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL | Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal | 25% | 75% | 300 |
| 8 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| *8.1* | Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| *8.2* | Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 300 |
| 9 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |
| *9.1* | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| *9.2* | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 100 |
| **III.** | PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL | Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan | 100% | 100,00 | 100 |
| 10 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100 |
| *10.1* | Pelaksanaan Kegiatan | Jumlah kegiatan promosi | 2 dokumen | 2 dokumen | 100 |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | (pameran investasi, matchmaking dan bussiness gathering) yang dilaksanakan | | | |
| *10.2* | Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100 |
| **IV.** | Program Pelayanan Penanaman Modal | Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu | 100% | 100% | 100 |
| 11 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai | 78% | 100% | 129.87 |
| *11.1* | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 10.000 pelaku usaha | 22.900 pelaku usaha | 229 |
| *11.2* | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | 1000 orang | 1552 pelaku usaha | 155.20 |
| **V.** | PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL | Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan | 84% | 100.00% | 119.05 |
| 12 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian | 405 Perusahaan | 407 Perusahaan | 100.49 |
| *12.1* | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 5 Kegiatan Usaha | 7 Kegiatan Usaha | 140 |
| *12.2* | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 350 pelaku usaha | 350 pelaku usaha | 100 |
| *12.3* | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang | 50 Kegiatan Usaha | 50 Kegiatan Usaha | 100 |

| NO | PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dilakukan Inspeksi Lapangan; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | | | |
| **VI.** | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL | Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | 100 persen | 100 persen | 100 |
| 13 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan | 2 Jenis (buku, publikasi) | 2 Jenis (buku, publikasi) | 100 |
| *13.1* | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100 |
| | **JUMLAH** | | | | |
| | ***= data sementara*** | | | | |

### 3.1.2 Capaian Anggaran Kinerja Utama

Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri didukung dengan dana yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Alokasi dana yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri untuk Tahun Anggaran 2025 senilai Rp. 7.745.590.205,- dengan rincian :

a. Belanja Pegawai : Rp. 4.359.025.700,-
b. Belanja Operasional : Rp. 3.386.564.505,-

Berikut disajikan hasil evaluasi akuntabilitas pengelolaan keuangan berkaitan dengan alokasi dana yang dianggarkan beserta realisasi penyerapannya.

***Pendapatan***

Pendapatan yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 yaitu Piutang Retribusi Izin Gangguan (IG) Tahun 2013-2017 tidak ada mutasi kurang.

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Pasal 14 ayat (3) berbunyi DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Sedangkan Pasal 14 ayat (2) berbunyi Perizinan Berusaha Tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam penjelasan ayat (3) disebutkan jenis retribusi Perizinan Berusaha Tertentu meliputi:

a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
c. Retribusi Izin Trayek; dan
d. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

***Realisasi Anggaran Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan***

Capaian Anggaran Organisasi disampaikan untuk mengetahui besaran anggaran yang digunakan dalam pencapaian kinerja tersebut. Capaian anggaran dihitung menggunakan cara realisasi dibagi dengan pagu dikalikan 100%. Secara lebih terperinci, nilai pagu alokasi dana beserta realisasi APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut :

**Tabel 3.1.2 a**
**Target dan Realisasi Program dan Kegiatan DPMPTSP**
**Tahun 2025**

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSEN (%) | ZONA PENYERAPAN ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **I.** | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **6,414,198,865.00** | **5,679,455,274.00** | **88.55%** | |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 441,800.00 | 341,000.00 | 77.18% | |
| *1.1* | *Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah* | 154,200.00 | 125,000.00 | 81.06% | *Zona Kuning* |
| *1.2* | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD* | 143,800.00 | 108,000.00 | 75.10% | *Zona Kuning* |
| *1.3* | *Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah* | 143,800.00 | 108,000.00 | 75.10% | *Zona Kuning* |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSEN (%) | ZONA PENYERAPAN ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 5,096,246,003.00 | 4,436,932,267.00 | 87.06% | |
| *2.1* | *Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN* | 4,359,025,700.00 | 3,756,945,783.00 | 86.19% | *Zona Kuning* |
| *2.2* | *Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN* | 737,146,303.00 | 679,913,284.00 | 92.24% | *Zona Hijau* |
| *2.3* | *Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD* | 74,000.00 | 73,200.00 | 98.92% | *Zona Hijau* |
| 3 | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | 143,800.00 | 120,000.00 | 83.45% | |
| *3.1* | *Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD* | 143,800.00 | 120,000.00 | 83.45% | *Zona Kuning* |
| 4 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 111,000,000.00 | 110,114,333.00 | 99.20% | |
| *4.1* | *Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan* | 111,000,000.00 | 110,114,333.00 | 99.20% | *Zona Hijau* |
| 5 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 989,040,633.00 | 971,281,751.00 | 98.20% | |
| *5.1* | *Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor* | 1,497,600.00 | 1,497,600.00 | 100.00% | *Zona Hijau* |
| *5.2* | *Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | 925,829,933.00 | 908,382,986.00 | 98.12% | *Zona Hijau* |
| *5.3* | *Penyediaan Peralatan Rumah Tangga* | 9,432,000.00 | 9,160,000.00 | 97.12% | *Zona Hijau* |
| *5.4* | *Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan* | 3,415,700.00 | 3,401,600.00 | 99.59% | *Zona Hijau* |
| *5.5* | *Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan* | 8,902,400.00 | 8,900,400.00 | 99.98% | *Zona Hijau* |
| *5.6* | *Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD* | 39,963,000.00 | 39,939,165.00 | 99.94% | *Zona Hijau* |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 186,326,629.00 | 130,607,813.00 | 70.10% | |
| *6.1* | *Penyediaan Jasa Surat Menyurat* | 5,750,000.00 | 5,132,500.00 | 89.26% | *Zona Hijau* |
| *6.2* | *Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik* | 134,856,629.00 | 79,859,163.00 | 59.22% | *Zona Merah* |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSEN (%) | ZONA PENYERAPAN ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|
| *6.3* | *Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor* | 45,720,000.00 | 45,616,150.00 | 99.77% | *Zona Hijau* |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 31,000,000.00 | 30,058,110.00 | 96.96% | |
| *7.1* | *Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan* | 31,000,000.00 | 30,058,110.00 | 96.96% | *Zona Hijau* |
| **II.** | **Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal** | **263,877,800.00** | **254,365,442.00** | **96.40%** | |
| 8 | Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 69,082,800.00 | 65,662,542.00 | 95.05% | |
| *8.1* | *Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal* | 46,017,800.00 | 45,056,542.00 | 97.91% | *Zona Hijau* |
| *8.2* | *Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota* | 23,065,000.00 | 20,606,000.00 | 89.34% | *Zona Hijau* |
| 9 | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 194,795,000.00 | 188,702,900.00 | 96.87% | |
| *9.1* | *Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota* | 5,476,500.00 | 5,135,000.00 | 93.76% | *Zona Hijau* |
| *9.2* | *Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/ Kota* | 189,318,500.00 | 183,567,900.00 | 96.96% | *Zona Hijau* |
| **III.** | **Program Promosi Penanaman Modal** | 166,287,300.00 | 165,395,150.00 | 99.46% | |
| 10 | Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 166,287,300.00 | 165,395,150.00 | 99.46% | |
| *10.1* | *Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota* | 157,194,300.00 | 156,421,150.00 | 99.51% | *Zona Hijau* |
| *10.2* | *Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/ Kota* | 9,093,000.00 | 8,974,000.00 | 98.69% | *Zona Hijau* |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSEN (%) | ZONA PENYERAPAN ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|
| **IV.** | **Program Pelayanan Penanaman Modal** | 519,547,000.00 | 486,111,572.00 | 93.56% | |
| 11 | Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | 519,547,000.00 | 486,111,572.00 | 93.56% | |
| *11.1* | *Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik* | 461,147,000.00 | 428,150,072.00 | 92.84% | *Zona Hijau* |
| *11.2* | *Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko* | 58,400,000.00 | 57,961,500.00 | 99.25% | *Zona Hijau* |
| **V.** | **Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | 275,886,200.00 | 248,223,961.00 | 89.97% | |
| 12 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | 275,886,200.00 | 248,223,961.00 | 89.97% | |
| *12.1* | *Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya* | 23,548,300.00 | 19,848,300.00 | 84.29% | *Zona Kuning* |
| *12.2* | *Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha* | 161,127,600.00 | 146,501,600.00 | 90.92% | *Zona Hijau* |
| *12.3* | *Pengawasan Penanaman Modal* | 91,210,300.00 | 81,874,061.00 | 89.76% | *Zona Hijau* |
| **VI.** | **Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal** | 105,793,040.00 | 105,587,200.00 | 99.81% | |
| 13 | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | 105,793,040.00 | 105,587,200.00 | 99.81% | |
| *13.1* | *Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan* | 105,793,040.00 | 105,587,200.00 | 99.81% | *Zona Hijau* |

| NO | PROGRAM/KEGIATAN | TARGET (Rp) | REALISASI (Rp) | PERSEN (%) | ZONA PENYERAPAN ANGGARAN |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Berusaha Terintegrasi secara Elektronik* | | | | |
| | **JUMLAH** | **7,745,590,205.00** | **6,939,138,599.00** | **89.59%** | ***Zona Hijau*** |

Keterangan:

a. Zona Merah : Interval Realisasi < 60%
b. Zona Kuning : Interval Realisasi 60% – 89%
c. Zona Hijau : Interval Realisasi ≥ 90%

Dari data diatas, sebanyak 23 indikator dalam zona hijau penyerapan anggaran, 6 indikator kinerja masuk dalam zona Kuning dan 1 indikator kinerja masuk dalam zona Merah.

### 3.1.3 Perbandingan Capaian Kinerja dan Anggaran (Efisiensi)

Untuk melihat efisiensi anggaran, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan (Σ) dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan (Σ) dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran. Rumus untuk pengukuran tersebut adalah sebagai berikut:

$$E = \frac{\sum_{i=1}^{n}((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^{n}(PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E : Efisiensi
PAKi : Pagu anggaran keluaran i
RAKi : Realisasi anggaran keluaran i
CKi : Capaian keluaran i

Berikut tabel 3.1.3 a tentang tingkat efisiensi pencapaian kinerja terhadap anggaran pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2025.

**TABEL 313 a**

**EFISIENSI PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DPMPTSP KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025**

| SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | EFISIENSI (%) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | ALOKASI | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=((7*6)-8)/(7*6) | 10 |
| **SASARAN RENSTRA:** **Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah** | | **Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah)** | **1,541,237.28** | **1,688,461.12** | **109.55%** | **7,745,590,205** | **6,939,138,599** | | |
| | | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan** | **88.13** | **89.52** | **101.58%** | | | | |
| | | **Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong** | **3 Mou** | **3 Mou** | **100.00%** | | | | |
| **Sasaran Program :** **Terwujudnya daya tarik investasi dan dunia usaha di Kabupaten Kediri** | **I PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL** | **Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal** | **25%** | **75%** | **300.00%** | **263,877,800** | **254,365,442** | **67.87** | **EFISIEN : Rp 179089319** |
| | 1 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal | 2 dokumen | 2 dokumen | 100.00% | 69,082,800 | 65,662,542 | **4.95** | EFISIEN : Rp 3420258 |
| | 1.1 Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal | Jumlah dokumen yang disusun atas kegiatan penetapan kebijakan mengenai pemberian fasilatas/insentif dan kemudahan penanaman modal | 1 dokumen | 1 dokumen | 100.00% | 46,017,800 | 45,056,542 | **2.09** | EFISIEN : Rp 961258 |
| | 1.2 Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah | 1 Dokumen | 3 Dokumen | 300.00% | 23,065,000 | 20,606,000 | **70.22** | EFISIEN : Rp 16196333 |
| | 2 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun | 2 dokumen | 2 dokumen | 100.00% | 194,795,000 | 188,702,900 | **3.13** | EFISIEN : Rp 6092100 |

| SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | EFISIENSI (%) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | ALOKASI | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=((7*6)-8)/(7*6) | 10 |
| | 2.1 Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 100.00% | 5,476,500 | 5,135,000 | **6.24** | EFISIEN : Rp 341500 |
| | 2.2 Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | 1 dokumen | 1 dokumen | 100.00% | 189,318,500 | 183,567,900 | **3.04** | EFISIEN : Rp 5750600 |
| **Sasaran Program : Terwujudnya minat investasi melalui promosi bagi calon investor** | **II PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL** | **Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan** | **100%** | **100,00** | **100.00%** | **166,287,300** | **165,395,150** | **0.54** | **EFISIEN : Rp 892150** |
| | 3 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan | 2 kegiatan | 2 kegiatan | 100.00% | 166,287,300 | 165,395,150 | **0.54** | EFISIEN : Rp 892150 |
| | 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah kegiatan promosi (pameran investasi, matchmaking dan bussiness gathering) yang dilaksanakan | 2 dokumen | 2 dokumen | 100.00% | 157,194,300 | 156,421,150 | **0.49** | EFISIEN : Rp 773150 |
| | 3.2 Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100.00% | 9,093,000 | 8,974,000 | **1.31** | EFISIEN : Rp 119000 |
| **Sasaran Program : Terwujudnya pelayanan perijinan yang cepat, mudah dan transparan** | **III PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL** | **Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu** | **100%** | **100.00%** | **100.00%** | **519,547,000** | **486,111,572** | **6.44** | **EFISIEN : Rp 33435428** |
| | 4 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai | 79% | 99.56% | 126.03% | 519,547,000 | 486,111,572 | **25.76** | EFISIEN : Rp 515689747 |
| | 4.1 Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan | 10000 pelaku usaha | 20747 pelaku usaha | 207.47% | 461,147,000 | 428,150,072 | **55.25** | EFISIEN : Rp 254779780 |

| SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN | | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | EFISIENSI (%) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | ALOKASI | REALISASI | | |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=((7*6)-8)/(7*6) | 10 |
| | 4.2 | Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan non Perizinan | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan | 1000 orang | 1552 pelaku usaha | 155.20% | 58,400,000 | 57,961,500 | **36.05** | EFISIEN : Rp 21053673 |
| **Sasaran Program : Terwujudnya kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan penanaman modal** | **IV** | **PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL** | **Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal** | **84%** | **100.00%** | **119.05%** | **275,886,200** | **248,223,961** | **24.42** | **EFISIEN : Rp 67378073** |
| | 5 | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian | 405 Perusahaan | 407 Perusahaan | 100.49% | 275,886,200 | 248,223,961 | **10.47** | EFISIEN : Rp 28882013 |
| | 5.1 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya | 5 Kegiatan Usaha | 7 Kegiatan Usaha | 140.00% | 23,548,300 | 19,848,300 | **39.79** | EFISIEN : Rp 9370943 |
| | 5.2 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha | Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko | 350 pelaku usaha | 350 pelaku usaha | 100.00% | 161,127,600 | 146,501,600 | **9.08** | EFISIEN : Rp 14626000 |
| | 5.3 | Pengawasan Penanaman Modal | Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha | 50 Kegiatan Usaha | 50 Kegiatan Usaha | 100.00% | 91,210,300 | 81,874,061 | **10.24** | EFISIEN : Rp 9336239 |

| SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | EFISIENSI (%) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | ALOKASI | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=((7*6)-8)/(7*6) | 10 |
| **Sasaran Program : Terwujudnya kemudahan akses informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan modal** | **V PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL** | **Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal** | **100 persen** | **100 persen** | **100.00%** | **105,793,040** | **105,587,200** | **0.19** | **EFISIEN : Rp 205840** |
| | 6 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan | 2 Jenis (buku, publikasi) | 2 Jenis (buku, publikasi) | 100.00% | 105,793,040 | 105,587,200 | **0.19** | EFISIEN : Rp 205840 |
| | 6.1 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik | Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100.00% | 105,793,040 | 105,587,200 | **0.19** | EFISIEN : Rp 205840 |
| **Sasaran Program : Terwujudnya cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota** | **VI PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA** | **Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **100%** | **100.00%** | **100.00%** | **6,414,198,865** | **5,679,455,274** | **11.45** | **EFISIEN : Rp 734743591** |
| | 7 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | 10 laporan | 100.00% | 441,800 | 341,000 | **22.82** | EFISIEN : Rp 100800 |
| | 7.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2 dokumen | 2 dokumen | 100.00% | 154,200 | 125,000 | **18.94** | EFISIEN : Rp 29200 |
| | 7.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 2 laporan | 2 laporan | 100.00% | 143,800 | 108,000 | **24.90** | EFISIEN : Rp 35800 |
| | 7.3 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 6 dokumen | 6 dokumen | 100.00% | 143,800 | 108,000 | **24.90** | EFISIEN : Rp 35800 |
| | 8 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 3 dokumen | 3 dokumen | 100.00% | 5,096,246,003 | 4,436,932,267 | **12.94** | EFISIEN : Rp 659313736 |
| | 8.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 23 Orang/bulan | 32 Orang/ bulan | 139.13% | 4,359,025,700 | 3,756,945,783 | **38.05** | EFISIEN : Rp 1658720918 |
| | 8.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.00% | 737,146,303 | 679,913,284 | **7.76** | EFISIEN : Rp 57233019 |

| SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | EFISIENSI (%) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | ALOKASI | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=((7*6)-8)/(7*6) | 10 |
| | 8.3 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 laporan | 1 laporan | 100.00% | 74,000 | 73,200 | **1.08** | EFISIEN : Rp 800 |
| | 9 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 2 laporan | 2 laporan | 100.00% | 143,800 | 120,000 | **16.55** | EFISIEN : Rp 23800 |
| | 9.1 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 2 laporan | 2 laporan | 100.00% | 143,800 | 120,000 | **16.55** | EFISIEN : Rp 23800 |
| | 10 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 100 | 100 | 100.00% | 111,000,000 | 110,114,333 | **0.80** | EFISIEN : Rp 885667 |
| | 10.1 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 32 Orang | 54 orang | 168.75% | 111,000,000 | 110,114,333 | **41.21** | EFISIEN : Rp 45747062 |
| | 11 Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | 100% | 100.00% | 989,040,633 | 971,281,751 | **1.80** | EFISIEN : Rp 17758882 |
| | 11.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100.00% | 1,497,600 | 1,497,600 | **0.00** | SESUAI ANGGARAN |
| | 11.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | 100.00% | 925,829,933 | 908,382,986 | **1.88** | EFISIEN : Rp 17446947 |
| | 11.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100.00% | 9,432,000 | 9,160,000 | **2.88** | EFISIEN : Rp 272000 |

| SASARAN | PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR | KINERJA | | | ANGGARAN | | EFISIENSI (%) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TARGET | REALISASI | CAPAIAN (%) | ALOKASI | REALISASI | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=((7*6)-8)/(7*6) | 10 |
| | 11.4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100.00% | 3,415,700 | 3,401,600 | **0.41** | EFISIEN : Rp 14100 |
| | 11.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100.00% | 8,902,400 | 8,900,400 | **0.02** | EFISIEN : Rp 2000 |
| | 11.6 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.00% | 39,963,000 | 39,939,165 | **0.06** | EFISIEN : Rp 23835 |
| | 12 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang Disediakan | 100% | 100% | 100.00% | 186,326,629 | 130,607,813 | **29.90** | EFISIEN : Rp 55718816 |
| | 12.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.00% | 5,750,000 | 5,132,500 | **10.74** | EFISIEN : Rp 617500 |
| | 12.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.00% | 134,856,629 | 79,859,163 | **40.78** | EFISIEN : Rp 54997466 |
| | 12.3 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100.00% | 45,720,000 | 45,616,150 | **0.23** | EFISIEN : Rp 103850 |
| | 13 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | 4 unit | 4 unit | 100.00% | 31,000,000 | 30,058,110 | **3.04** | EFISIEN : Rp 941890 |
| | 13.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 4 unit | 4 unit | 100.00% | 31,000,000 | 30,058,110 | **3.04** | EFISIEN : Rp 941890 |

**Sasaran : Meningkatnya kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah**

Dari Tabel 3.1.3 a (Efisiensi Pencapaian Kinerja dan Anggaran DPMPTSP Kabupaten Kediri Tahun 2025), pelaksanaan program dan kegiatan terhadap penganggaran Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar program, kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan berjalan efisien berdasarkan rumus efisiensi dari Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga.

**Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan maupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

**Tabel 3.1.3 b**
**Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja Tahun 2025**

| PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG |
|---|---|---|---|
| ***PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA*** | ***Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah*** | ***100%*** | ***Menunjang*** |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100% | Menunjang |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah | 100% | Menunjang |
| Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Jumlah laporan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah | 100% | Menunjang |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah | 100% | Menunjang |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintaah Daerah yang | 100% | Menunjang |

| PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG |
|---|---|---|---|
| | Disediakan | | |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah Barang Milik Daerah (BMD) Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara | 100% | Menunjang |
| ***PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL*** | ***Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/ fasilitas di bidang penanaman modal*** | ***300.00%*** | ***Menunjang*** |
| Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah dokumen yang disusun atas penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal | 100.00% | Menunjang |
| Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen RUPM, Peta potensi dan peluang usaha yang disusun | 100% | Menunjang |
| ***PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL*** | ***Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan*** | ***100%*** | ***Menunjang*** |
| Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah media promosi, market inteligent, publikasi dan kegiatan promosi yang dilakukan | 100% | Menunjang |
| ***PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL*** | ***Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu*** | ***100.00%*** | ***Menunjang*** |
| Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota | Prosentase ijin dan pemenuhan komitmen terbit dan selesai | 126.03% | Menunjang |
| ***PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL*** | ***Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan*** | ***119.05%*** | ***Menunjang*** |
| Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah perusahaan yang dilaksanakan pengendalian | 100.49% | Menunjang |

| PROGRAM/ KEGIATAN | INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN (%) | MENUNJANG/ TIDAK MENUNJANG |
|---|---|---|---|
| ***PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL*** | ***Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal*** | ***100%*** | ***Menunjang*** |
| Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Jenis Penyajian Data dan Informasi perizinan | 100% | Menunjang |

Pada tahun 2025, seluruh program menunjang pencapaian kinerja sasaran dengan penjelasan sebagai berikut:

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pada program ini terdiri dari 6 (enam) kegiatan dan 17 (tujuh belas) sub kegiatan, yang secara umum menunjang kegiatan yang bersifat rutin atau administratif perkantoran. Mulai dari perencanaan program/kegiatan, monitoring/evaluasi, gaji dan tunjangan pegawai, pembinaan kepegawaian, pengelolaan dan pengendalian administrasi umum, urusan rumah tangga dan sarana prasarana. Adanya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menunjang peningkatan Indikator Kinerja Utama "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan".

II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Pada program ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan dan 4 (empat) sub kegiatan. Adanya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal menunjang keberhasilan Indikator Kinerja Utama "Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong" dan "Nilai Realisasi Investasi di Daerah". Kegiatan pada program ini bertujuan memberikan kemudahan investasi pada kabupaten kediri melalui kebijakan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal, penyusunan rencana umum penanaman modal, kajian peta potensi dan peluang usaha yang ada di Kabupaten Kediri yang siap ditawarkan ke investor.

III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adanya program Promosi Penanaman Modal mendukung Indikator Kinerja Utama peningkatan "Nilai Realisasi Investasi di Daerah" melalui promosi potensi dan peluang investasi yang ada di Kabupaten Kediri. Baik melalui promosi langsung ke perusahaan atau melalui pameran investasi.

IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 2 (dua) sub kegiatan. Adanya Program Pelayanan Penanaman Modal mendukung Indikator Kinerja Utama peningkatan "Nilai Realisasi Investasi di Daerah" dan "Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan". Kegiatan yang ada pada program ini meliputi Konsultasi permasalahan perizinan, pelayanan penerbitan izin berusaha maupun non berusaha baik di kantor maupun pelayanan keliling ke setiap kecamatan.

V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 3 (tiga) sub kegiatan. Adanya Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal mendukung Indikator Kinerja Utama peningkatan "Nilai Realisasi Investasi di Daerah". Kegiatan yang ada pada program ini meliputi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal, Evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha para pelaku usaha, Bimbingan Teknis kepada para pelaku usaha, Penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya.

VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Adanya Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal mendukung Indikator Kinerja Utama peningkatan "Nilai Realisasi Investasi di Daerah". Kegiatan yang ada pada program ini meliputi sosialisasi pelayanan perizinan, publikasi melalui media sosial, media cetak, pengelolaan data dan informasi pada DPMPTSP Kabupaten Kediri dan Pengaduan masyarakat.

### 3.1.4 Perbandingan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya

Dalam melihat konsistensi peningkatan dari tahun ke tahun, ditampilkan realisasi kinerja dari dua tahun sebelumnya. Perbandingan realisasi kinerja dari tahun ke tahun digunakan untuk mengetahui fluktuasi peningkatan apakah meningkat secara konsisten, bertahan, fluktuatif atau menurun secara konsisten. Dari perbandingan realisasi tersebut dijadikan sebagai bahan evaluasi bersama, terutama perbaikan-perbaikan kinerja.

**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 s.d. Tahun 2025**

1. Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah

   Indikator ini merupakan indikator kinerja sasaran RPJMD yang menunjukan prosentase pertumbuhan investasi di daerah pada tahun 2025. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dari target yang direncanakan pada tahun 2025 direalisasikan sebesar -63,58%, sementara target yang ingin dicapai sebesar 29,99%. Dengan persentase capaian kinerja ini sebesar -212,00%.

**Tabel 3.1.4 a**

**Prosentase Pertumbuhan Investasi di Daerah Tahun 2021-2025**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 3% | 5% | 6% | 7% | 29,99 % |
| **Realisasi** | 37,55 % | 35,07 % | 26,16 % | 29,99 % | -63,58% |

Dari segi persentase pertumbuhan investasi, dapat disimpulkan bahwa pada Tahun 2025 pertumbuhan investasi di Kabupaten Kediri mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024.

Kondisi tersebut terutama dipengaruhi oleh selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi kontributor utama realisasi investasi daerah.

Pada periode konstruksi, PSN bandara memberikan kontribusi investasi yang signifikan, khususnya pada sektor transportasi, Gudang dan telekomunikasi. Memasuki Tahun 2025, proyek tersebut telah selesai secara fisik dan finansial, sehingga tidak lagi tercatat sebagai realisasi investasi baru pada tahun berjalan. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan nilai investasi secara komparatif apabila dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang ditopang oleh proyek berskala besar (PSN).

2. Nilai Realisasi Investasi di Daerah

Indikator ini merupakan indikator kinerja sasaran Renstra yang menunjukan nilai realisasi investasi di Kabupaten Kediri pada tahun 2025. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa dari target yang direncanakan pada tahun 2025 dapat direalisasikan sebesar Rp. 1.688.461.116.537,00 dari target tahun 2025 sebesar Rp. 1.541.237.276.775,00. Artinya persentase capaian kinerja ini sebesar 109,55%.

**Tabel 3.1.4 b**

**Jumlah Realisasi Investasi Tahun 2021 – 2025**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 533.365.636.600 | 694.396.060.924 | 736.059.824.579 | 3.200.000.000.000 | 1.541.237.276.775 |
| **Realisasi** | 2.476.068.899.792 | 3.180.910.111.886 | 3.204.083.366.778 | 4.636.215.436.458 | 1.688.461.116.537 |

Pada table 3.1.4 b di atas, realisasi investasi pada tahun 2025 telah mencapai target yang ditetapkan. Nilai realisasi investasi selama tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2021 capaian realisasi investasi sebesar 2,48 Triliun Rupiah, diikuti tahun 2022 sebesar 3,18 Triliun Rupiah kemudian tahun 2023 sebesar 3,2 Triliun Rupiah dan kembali meningkat pada tahun 2024 menjadi 4.64 Triliun Rupiah, yang mencerminkan kondisi investasi daerah masih tumbuh positif dan relatif stabil. Namun pada tahun 2025

pertumbuhan investasi tercatat sebesar 1,69 Triliun Rupiah, yang disebabkan oleh selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi kontributor utama realisasi investasi daerah.

Namun, apabila dilakukan perbandingan data dengan membandingkan Investasi Non-Bandara seperti pada tabel 3.1.4 c, maka terdapat pertumbuhan sebesar 16,1% (dari Rp1,45 Triliun di tahun 2024 menjadi Rp1,69 Triliun di tahun 2025).

**Tabel 3.1.4 c**

**Realisasi Investasi Berdasarkan Kategori Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Non PSN**

Dalam Triliun Rupiah

| URAIAN | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Target Renstra | 0,533 | 0,694 | 0,736 | 0,788 | 0,851 |
| B. Realisasi Investasi PSN | 1,48 | 2,09 | 2,01 | 3,18 | 0 |
| % Pertumbuhan | -11,83 | 40,90 | -3,86 | 58,72 | -100 |
| C. Realisasi Investasi Non PSN | 0,995 | 1,095 | 1,199 | 1,454 | 1,689 |
| % Pertumbuhan | 50.57 | 9.98 | 9.48 | 21.25 | 16.14 |
| D. Total Realisasi Investasi | 2,48 | 3,18 | 3,20 | 4,64 | 1,69 |
| % Pertumbuhan | 37.55 | 35.07 | 26.16 | 29.99 | -63.58 |

Sumber: Laporan Realisasi Investasi Tahun 2021-2025

Secara Total, Pertumbuhan investasi daerah selama tahun 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada Tahun 2021-2024 pertumbuhan investasi relatif meningkat yang mencerminkan kondisi investasi daerah masih tumbuh positif dan relatif stabil. Namun pada tahun 2025 pertumbuhan investasi tercatat -63,58%, yang disebabkan oleh selesainya Proyek Strategis Nasional (PSN) Bandara yang pada tahun-tahun sebelumnya menjadi kontributor utama realisasi investasi daerah. Apabila dilakukan perbandingan data dengan membandingkan Investasi Non-Bandara, maka terdapat pertumbuhan sebesar positif setiap tahunnya. Bahkan pada tahun 2025 terdapat pertumbuhan sebesar 16,1% (dari Rp1,45 Triliun di tahun 2024 menjadi Rp1,69 Triliun di tahun 2025)

3. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan.

Capaian indikator ini ditunjukan dengan nilai IKM yang dicapai sebagai hasil dari survey yang telah dilakukan. Adapun hasil evaluasi atas pelayanan perijinan pada Tahun 2025 menunjukan nilai IKM DPMPTSP sebesar 89,52.

**Tabel 3.1.4 d**
**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Perizinan**
**Tahun 2021-2025**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | 76,0 | 79,60 | 79,65 | 84,70 | 88,13 |
| **Realisasi** | 80,60 | 83,07 | 84,25 | 85,05 | 89,52 |

Dari grafik dan tabel 3.7 di atas menunjukan realisasi nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayanan Perizinan pada tahun 2025 sudah memenuhi target yang ditetapkan, bahkan melampaui target yang ditetapkan dalam Renja. Meskipun demikian, DPMPTSP akan selalu melakukan perbaikan ataupun meningkatkan kualitas pelayanan agar terwujudnya kepuasan penerima pelayanan/pemohon izin di DPMPTSP Kabupaten Kediri.

4. Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong.

Capaian indikator ini ditunjukan dengan jumlah kerjasama usaha antara usaha kecil dan usaha menengah atau usaha besar yang dituangkan dalam dokumen formal. Adapun jumlah kemitraan pada Tahun 2025 yang dicapai DPMPTSP sebesar 3 Pernyataan Minat/Mou.

**Tabel 3.1.4 e**
**Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong**
**Tahun 2020-2023**

| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Target** | - | 1 MoU | 1 MoU | 1 MoU | 3 MoU |
| **Realisasi** | - | 1 MoU | 1 MoU | 12 MoU/ Pernyataan Minat | 3 MoU/ Pernyataan Minat |

Dari grafik dan tabel 3.1.4 d di atas menunjukan realisasi jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong pada tahun 2025 sudah terpenuhi yaitu:

1. REI dengan PT Sinar Kediri Sakti, PT Globalindo Furniture, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kediri, mencakup kegiatan kerjasama Akses Pemasaran Perumahan dan Penyediaan Furniture;
2. LTE CRUISE dengan PT Giandra Bisa Bersama, mencakup kegiatan pelatihan calon tenaga kerja hotel dan kapal pesiar internasional;
3. Dapur Lansia dan Disabilitas Kepung dengan Nusantara Fres, mencakup kegiatan supply buah pisang cavendish.

**Tabel 3.1.4. f**

**Rekapitulasi Perbandingan Realisasi dengan Realisasi Tahun Sebelumnya**

| Sasaran | Indikator | Realisasi Kinerja | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Meningkatnya kinerja penanaman modal dan pelayanan perizinan di daerah | Nilai realisasi investasi di daerah (Juta Rupiah) | 3.204.083 | 4.636.215 | 1.688.461 | Penurunan pada Tahun 2025 |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan | 84,25 | 85,05 | 89,52 | Konsisten Meningkat |
| | Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong | 1 MoU | 12 MoU/ Pernyataan Minat | 3 MoU/ Pernyataan Minat | Penurunan pada Tahun 2025 |

Dari data diatas, sebanyak 1 (satu) indikator kinerja dengan keterangan konsisten meningkat

### 3.1.5 Perbandingan Realisasi dengan Target Jangka Menengah

*Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2021-2026*

Pada Tahun 2025, nilai realisasi investasi (Rp 1.688.461.116.537,00) di daerah Kabupaten Kediri telah melampaui target akhir rencana strategis tahun 2026 (Rp 927.143.899.279,00).

Pada Tahun 2025, target realisasi investasi telah dievaluasi dengan memperhatikan potensi yang ada di Kabupaten Kediri dan adanya Proyek Strategis Nasional (PSN).

**Tabel 3.1.5 a**
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Akhir Rencana Strategis 2026**

| INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN 2025 | TARGET AKHIR RENCANA STRATEGIS | REALISASI KINERJA TAHUN 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah) | 1.541.237 | 927.143,90 | 1.688.461 | Sumber: data.bkpm.go.id dan oss.go.id |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan | 88,13 | 79,80 | 89,52 | Hasil Rata-rata SKM Tahun 2025 |
| Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong | 3 MoU | 1 MoU | 3 MoU | terlampir |

### 3.1.6 *Benchmarking*

***Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi dan Nasional***

Kontribusi Kabupaten Kediri terhadap nilai realisasi investasi pada tingkat provinsi dan nasional ditampilkan pada tabel 3.1.6 a berikut:

**Tabel 3.1.6 a**
**Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi dan Target Nasional**

| INDIKATOR SASARAN | TARGET TAHUN 2025 | REALISASI KINERJA TAHUN 2025 | TARGET PROVINSI TAHUN 2025 | TARGET NASIONAL TAHUN 2025 | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah) | 1.541.237 | 1.688.461 | 117.000.000<br>**Realisasi:**<br>147.700.000 | 1.905.600.000<br>**Realisasi:**<br>1.931.200.000 | Realisasi investasi kabupaten Kediri berkontribusi sebesar 1,14% dari target provinsi dan 0,087% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | dari target nasional |
| Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan | 88,13 | 89,52 | - | - | |
| Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong | 3 MoU | 3 MoU | - | - | |

Sedangkan jika dibandingkan dengan realisasi yang ada, nilai realisasi investasi kabupaten kediri berkontribusi sebesar 1,14% dari realisasi investasi provinsi dan 0,087% dari realisasi investasi nasional. Capaian ini mengindikasikan bahwa investasi daerah tetap tumbuh dan berperan dalam mendukung kinerja investasi regional dan nasional, meskipun secara nominal masih relatif terbatas dibandingkan total realisasi di tingkat provinsi dan nasional. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh skala dan karakteristik investasi daerah, sehingga ke depan diperlukan penguatan fasilitasi penanaman modal, peningkatan daya tarik sektor unggulan, serta perluasan promosi investasi untuk mendorong peningkatan pertumbuhan dan kontribusi investasi daerah secara berkelanjutan.

### 3.1.7 Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja

**Target 3.1.7.a**
**Program/Kegiatan/Sub-Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja**

| Program/ Kegiatan | Indikator | Target Kinerja | | | Kategori Dukungan | Catatan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 100% | 100% | 100% | Sangat Mendukung | Mendukung Administrasi Rutin |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Persentase Pelaku usaha yang diberikan insentif/fasilitas di bidang penanaman modal | 25% | 75% | 300% | Sangat Mendukung | Fasilitasi Kerjasama dan IPRO |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Program Promosi Penanaman Modal | Prosentase pelaksanaan strategi dan kegiatan promosi yang dilaksanakan | 100% | 100% | 100% | Sangat Mendukung | Promosi langsung ke perusahaan dan Pameran |
| Program Pelayanan Penanaman Modal | Prosentase pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu | 100% | 100% | 100% | Sangat Mendukung | Pelayanan Izin |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Persentase Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang dilaksanakan | 84% | 100% | 119,05 % | Sangat Mendukung | Pengawasan Penanaman Modal |
| Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Prosentase pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal | 100% | 100% | 100% | Sangat Mendukung | |

***Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternative Solusi yang Dilakukan***

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2025, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun bersangkutan dan tidak menemui hambatan yang berarti. Upaya yang telah dilakukan untuk mendukung peningkatan investasi di Kabupaten Kediri antara lain:

a. Peningkatan sarana dan prasarana dinas untuk menunjang Mall Pelayanan Publik Kabupaten Kediri berupa belanja modal 1 paket genset 100 KVA dan instalasinya, 1 set CCTV Ruang Pelayanan, 1 unit Digital Signage 55", 20 unit Papan Nama, 1 unit Tablet Samsung, 13 unit UPS Spesifikasi: 1.100VA, 42 buah Kursi hadap, 20 buah Meja kerja, 1 set Set Meja Rapat Uk 600 x 150x 75 plus 25 kursi, 2 unit Dispenser Air, 3 unit Komputer PC, 3 buah Printer, 1 unit internet satelite. Dengan

adanya keterbatasan alokasi anggaran, pengadaan sarana prasarana akan dilanjutkan pada tahun berikutnya;

b. Pembangunan Mall Pelayanan Publik Tahap 2 pada tahun 2025
c. Pembahasan Draft Peraturan Daerah Kabupaten Kediri tentang Penanaman Modal yang diharapkan akan mempermudah investasi di daerah;
d. Pada Tahun 2025, DPMPTSP Kabupaten Kediri telah menyelenggarakan sosialisasi perizinan kepada 350 pengusaha lokal di Kabupaten Kediri. Dalam sosialisasi tersebut ada muatan terkait potensi dan peluang investasi Kabupaten Kediri. Dengan adanya sosialisasi tersebut diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan memperluas investasi yang ada dengan mengembangkan potensi yang ada. Selain itu telah dilakukan fasilitasi dan gathering mengatasi permasalahan dalam rangka mengawal keberadaan investor lokal yang ada;
e. Memaksimalkan promosi investasi, Langkah yang akan dilakukan:
    1. Penyusunan Kajian Investment Ready to Offer (IPRO) tema Industri Pengolahan Biofarmaka Berbasis Komoditas Unggulan Kabupaten Kediri;
    1. Mengikuti East Java Invesment Forum
f. Untuk lebih meningkatkan kinerja investasi di daerah kolaborasi kerja antar dinas untuk memaksimalkan potensi daerah yang ada sehingga menarik untuk ditawarkan investor.

Untuk perbaikan pada tahun selanjutnya akan dilakukan analisa terhadap realisasi investasi daerah selama tahun 2023–2025 yang menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Untuk mengukur seberapa kuat kontribusi output perizinan terhadap outcome investasi, dengan pendekatan kuantitatif Indeks Keterkaitan Perizinan–Investasi (IKPI) “Analisis Keterkaitan Perizinan Berusaha dengan Realisasi Investasi di Kabupaten Kediri” dengan rumus berikut:

$$\text{IKPI} = \frac{\text{Pertumbuhan Realisasi Investasi (\%)}}{\text{Pertumbuhan Jumlah Izin (\%)}}$$

Keterangan:

a. Jika IKPI > 1 → Investasi tumbuh lebih cepat dari izin → keterkaitan kuat.
b. Jika IKPI = 1 → Pertumbuhan proporsional.
c. Jika IKPI < 1 → Izin meningkat tapi investasi lambat → keterkaitan lemah.

**Tabel 3.1.7.b**

**Perhitungan Indeks Keterkaitan Perizinan–Investasi (IKPI) Tahun 2023-2025**

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| **NIB Terbit** | 15.687 | 16.937 | 22.117 | 20.747 |
| **% Pertumbuhan NIB** | | 7,97 | 30,58 | -6,19 |
| **% Pertumbuhan Investasi** | | 26.16 | 29.99 | -63.58 |
| **IKPI** | | 3,28 | 0,98 | -10,27 |

Rumus Indeks Keterkaitan merupakan model turunan dari beberapa pendekatan ilmiah konsep elastisitas dalam ekonomi yang diperkenalkan oleh Alfred Marshall (1890, Principles of Economics) yang mengukur responsivitas investasi terhadap perubahan jumlah izin dan Logic Model Kinerja Publik oleh Mahmudi dan Mardiasmo yang menekankan hubungan output terhadap outcome dalam pengukuran efektivitas sektor publik. Untuk konsep keterkaitan sektor dikembangkan oleh Albert O. Hirschman yang mengukur kekuatan hubungan antar variabel ekonomi.

Indeks Keterkaitan Perizinan–Investasi menunjukkan keterkaitan kuat pada tahun 2023 (3,28), pertumbuhan proporsional pada tahun 2024 (0,98), dan keterkaitan melemah pada tahun 2025 (-10,27). Hal ini mengindikasikan bahwa faktor eksternal sangat dominan mempengaruhi investasi (PSN). Ketika proyek besar/ PSN terealisasi IKPI menunjukan pertumbuhan tinggi (2023–2024) sedangkan pada tahun 2025, mengalami penurunan yang signifikan karena selesainya proyek besar/ PSN. Bukan semata-mata akibat penurunan kinerja pelayanan perizinan.

Selanjutnya Analisa dari Interpretasi Tingkat Efektivitas Sektor Perizinan mana saja yang berhasil menarik Investasi menggunakan rumus berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Nilai Realisasi Investasi}}{\text{Jumlah NIB/Izin Terbit}}$$

Keterangan Nilai Rasio:

a. Rp 5 M / izin | Sangat Efektif | Perizinan berhasil menarik investasi besar
b. Rp 1 M – Rp 5 M / izin | Efektif | Izin cukup berkualitas dan menghasilkan aktivitas ekonomi
c. Rp 250 Jt – Rp 1 M / izin | Cukup Efektif | Banyak usaha berjalan, tapi skala kecil–menengah
d. Rp 50 Jt – Rp 250 Jt / izin | Kurang Efektif | Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas
e. < Rp 50 Jt / izin | Tidak Efektif | Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi

Perhitungan Interpretasi Tingkat Efektivitas Sektor Perizinan disajikan pada Tabel 3.1.7 c.

**Tabel 3.1.7.c**

**Perhitungan Interpretasi Tingkat Efektivitas Sektor Perizinan**

**Tahun 2023-2025**

| KODE KBLI SEKTOR | SEKTOR USAHA | JUMLAH IZIN TERBIT | JUMLAH PROYEK | NILAI INVESTASI (TRILIUN RP) | RASIO EFEKTIVITAS PERIZINAN | KETERANGAN NILAI RASIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/3 | 7 |
| A | Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan | 4,271 | 5,077 | 469,221,987,113.00 | 109,862,324.00 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| A | Kehutanan | 61 | 89 | 6,479,500,000.00 | 106,221,311.48 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| A | Perikanan | 1,091 | 1,157 | 37,267,940,009.00 | 34,159,431.72 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| B | Pertambangan | 100 | 169 | 31,965,491,500.00 | 319,654,915.00 | Cukup Efektif - Banyak usaha berjalan, tapi skala kecil–menengah |
| C | Industri Makanan | 20,912 | 25,885 | 642,607,651,582.00 | 30,729,134.07 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| C | Industri Tekstil | 355 | 395 | 16,032,800,000.00 | 45,162,816.90 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | administratif, belum mendorong investasi |
| C | Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki | 18 | 20 | 545,000,000.00 | 30,277,777.78 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| C | Industri Kayu | 261 | 306 | 56,548,114,137.00 | 216,659,441.14 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| | Industri Kertas dan Percetakan | 289 | 344 | 89,538,930,445.00 | 309,823,288.74 | Cukup Efektif - Banyak usaha berjalan, tapi skala kecil–menengah |
| C | Industri Kertas dan Percetakan | 214 | 252 | 86,742,392,439.00 | 405,338,282.43 | Cukup Efektif - Banyak usaha berjalan, tapi skala kecil–menengah |
| J | Industri Kertas dan Percetakan | 75 | 92 | 2,796,538,006.00 | 37,287,173.41 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| C | Industri Kimia Dan Farmasi | 437 | 519 | 57,883,377,688.00 | 132,456,241.85 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| C | Industri Karet dan Plastik | 287 | 292 | 18,142,950,003.00 | 63,215,853.67 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | terbatas |
| C | Industri Mineral Non Logam | 136 | 161 | 16,636,401,938.00 | 122,326,484.84 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| C | Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya | 331 | 372 | 20,641,194,000.00 | 62,360,102.72 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| C | Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 193 | 251 | 18,540,866,099.00 | 96,066,663.73 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| C | Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain | 17 | 17 | 1,834,000,000.00 | 107,882,352.94 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| | Industri Lainnya | 403 | 450 | 17,807,329,038.00 | 44,186,920.69 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| C | Industri Lainnya | 319 | 345 | 11,624,079,038.00 | 36,439,119.24 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| E | Industri Lainnya | 84 | 105 | 6,183,250,000.00 | 73,610,119.05 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | terbatas |
| | Perdagangan dan Reparasi | 17,131 | 22,176 | 947,703,979,548.00 | 55,320,995.83 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| C | Perdagangan dan Reparasi | 222 | 245 | 27,794,600,000.00 | 125,200,900.90 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| G | Perdagangan dan Reparasi | 16,909 | 21,931 | 919,909,379,548.00 | 54,403,535.37 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| | Listrik, Gas dan Air | 76 | 91 | 6,722,902,205.00 | 88,459,239.54 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| D | Listrik, Gas dan Air | 46 | 58 | 5,410,902,205.00 | 117,628,308.80 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| E | Listrik, Gas dan Air | 30 | 33 | 1,312,000,000.00 | 43,733,333.33 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| F | Konstruksi | 1,050 | 2,848 | 318,312,772,061.00 | 303,155,021.01 | Cukup Efektif - Banyak usaha berjalan, tapi skala kecil–menengah |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 1,096 | 1,283 | 4,833,793,473,620.00 | 4,410,395,505.13 | Efektif - Izin cukup berkualitas dan menghasilkan aktivitas ekonomi |
| H | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 648 | 791 | 4,821,262,588,620.00 | 7,440,220,044.17 | Sangat Efektif - Perizinan berhasil menarik investasi besar |
| J | Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi | 448 | 492 | 12,530,885,000.00 | 27,970,725.45 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| I | Hotel dan Restoran | 9,107 | 9,966 | 156,404,177,328.00 | 17,174,061.42 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| | Jasa Lainnya | 4,469 | 6,061 | 660,415,472,944.00 | 147,777,013.41 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| J | Jasa Lainnya | 296 | 425 | 13,343,194,332.00 | 45,078,359.23 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| K | Jasa Lainnya | 201 | 239 | 29,663,892,097.00 | 147,581,552.72 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| M | Jasa Lainnya | 449 | 665 | 25,182,768,285.00 | 56,086,343.62 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | terbatas |
| N | Jasa Lainnya | 1,217 | 2,025 | 129,981,651,017.00 | 106,804,972.08 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| P | Jasa Lainnya | 635 | 928 | 73,534,346,061.00 | 115,802,119.78 | Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas |
| Q | Jasa Lainnya | 156 | 174 | 100,857,382,580.00 | 646,521,683.21 | Cukup Efektif - Banyak usaha berjalan, tapi skala kecil–menengah |
| R | Jasa Lainnya | 176 | 215 | 259,129,378,703.00 | 1,472,326,015.36 | Efektif - Izin cukup berkualitas dan menghasilkan aktivitas ekonomi |
| S | Jasa Lainnya | 1,335 | 1,386 | 28,680,859,869.00 | 21,483,790.16 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| T | Jasa Lainnya | 4 | 4 | 42,000,000.00 | 10,500,000.00 | Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi |
| L | Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran | 278 | 311 | 223,500,648,394.00 | 803,959,166.88 | Cukup Efektif - Banyak usaha berjalan, tapi skala kecil–menengah |

Sumber: data.bkpm.go.id, oss.go.id, data diolah

Berdasarkan Perhitungan Interpretasi Tingkat Efektivitas Sektor Perizinan pada Tabel 3.1.7.c, terdapat:

1. Nilai rasio Efektif - Izin cukup berkualitas dan menghasilkan aktivitas ekonomi pada sektor usaha Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Bidang Usaha H Pengangkutan dan Pergudangan) dan Jasa Lainnya (Bidang Usaha R Kesenian, Hiburan dan Rekreasi)
2. Nilai Rasio Cukup Efektif - Banyak usaha berjalan, tapi skala kecil–menengah pada sektor usaha Pertambangan B (Bidang Usaha B Pertambangan dan Penggalian); Industri Kertas dan Percetakan (Bidang Usaha C Industri Pengolahan); Konstruksi; Jasa Lainnya (Bidang Usaha Q Aktivitas Kesehatan Manusia Dan Aktivitas Sosial); Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran (Real Estat)
3. Nilai Rasio Kurang Efektif - Dominasi izin mikro, dampak ekonomi terbatas pada sektor usaha Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan (Bidang Usaha A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan); Kehutanan (Bidang Usaha A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan); Industri Kayu (Bidang Usaha C Industri Pengolahan); Industri Kimia Dan Farmasi C (Bidang Usaha C Industri Pengolahan); Industri Karet dan Plastik C (Bidang Usaha C Industri Pengolahan); Industri Mineral Non Logam C (Bidang Usaha C Industri Pengolahan); Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya (Bidang Usaha C Industri Pengolahan); Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam (Bidang Usaha C Industri Pengolahan); Industri Kendaraan Bermotor dan Alat Transportasi Lain (Bidang Usaha C Industri Pengolahan); Industri Lainnya (Bidang Usaha E Treatment Air, Treatment Air Limbah, Treatment dan Pemulihan Material Sampah, dan Aktivitas Remediasi); Perdagangan dan Reparasi (Bidang Usaha C Industri Pengolahan dan Bidang Usaha G Perdagangan Besar Dan Eceran Reparasi Dan Perawatan Mobil Dan Sepeda Motor); Listrik, Gas dan Air (Bidang Usaha D Pengadaan Listrik, Gas, Uap/Air Panas Dan Udara Dingin); Jasa Lainnya (Bidang Usaha K Aktivitas Keuangan dan Asuransi, Bidang Usaha M Aktivitas Profesional, Ilmiah Dan Teknis, Bidang Usaha N Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan dan Penunjang Usaha Lainnya, Bidang Usaha P Pendidikan)

4. Nilai Rasio Tidak Efektif - Perizinan bersifat administratif, belum mendorong investasi pada sektor usaha Perikanan (Bidang Usaha A Pertanian, Kehutanan dan Perikanan), Industri Makanan (Bidang Usaha C Industri Pengolahan), Industri Tekstil (Bidang Usaha C Industri Pengolahan), Industri Barang dari Kulit dan Alas Kaki (Bidang Usaha C Industri Pengolahan), Industri Kertas dan Percetakan (Bidang Usaha J Informasi Dan Komunikasi), Industri Lainnya (Bidang Usaha C Industri Pengolahan), Listrik, Gas dan Air (Bidang Usaha E), Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi (Bidang Usaha J Informasi Dan Komunikasi), Hotel dan Restoran (Bidang Usaha I Penyediaan Akomodasi Dan Penyediaan Makan Minum), Jasa Lainnya (Bidang Usaha J Informasi Dan Komunikasi, Bidang Usaha S Aktivitas Jasa Lainnya Bidang Usaha T Aktivitas Rumah Tangga Sebagai Pemberi Kerja; Aktivitas Yang Menghasilkan Barang Dan Jasa Oleh Rumah Tangga yang Digunakan untuk Memenuhi Kebutuhan Sendiri)

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan "**Penurunan realisasi investasi pada tahun 2025 bukan dikarenakan turunnya kualitas pelayanan perizinan, melainkan karena selesainya proyek besar/PSN dan struktur investasi yang tergantung pada proyek besar/ PSN**".

Sementara analisa sektor lainnya, jumlah izin yang banyak tetapi realisasi investasi kecil, mayoritas yang berasal dari usaha mikro/ kecil/ Usaha skala rumah tangga. Dengan adanya kondisi tersebut realisasi investasi rentan terhadap fluktuasi tahunan.

Sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan realisasi investasi, strategi yang dapat dilakukan adalah "Meningkatkan jumlah izin menjadi Meningkatkan nilai investasi per izin" dengan cara:

1. Pengembangan investasi sektor logistik dan pergudangan, Kesehatan dan rekreasi, Real estat
2. Fasilitasi kemitraan UMKM dengan industri besar
3. Hilirisasi hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah
4. Memprioritaskan promosi pada sektor efektif
5. Identifikasi izin skala kecil yang berpotensi berkembang
6. Penguatan Klinik investasi (KLINKED) untuk penyelesaian hambatan realisasi

## 3.2 Analisis Capaian Kinerja Organisasi

### 3.2.1 Pelaksanaan Kinerja Organisasi

Upaya Tindak Lanjut atas Rencana Tindak Lanjut tahun sebelumnya

| Rencana Tindak Lanjut Tahun sebelumnya | Upaya yang telah dilaksanakan |
|---|---|
| 1. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 700.1.2.1_202/418.11/2024 Tanggal 12 Juli 2024:<br>a. Melengkapi dasar perhitungan penetapan target kinerja yang ingin dicapai dengan data pendukung dan rasionalisasinya melalui analisis/kajian<br>b. Mengupload dokumen perencanaan pada website yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum. | a. Penetapan target kinerja tahun 2025 telah berdasarkan hasil analisis dari tren tahun sebelumnya dan kajian yang telah disusun (target investasi)<br>b. Dokumen Perencanaan telah diupload pada website<br><br>Bukti Dukung pada link:<br>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HYyOgmrG5wkYxb6AcXsBla8kbGh0cALQ |
| 2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansu Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor 700.1.2.1/ /418.11/2025 :<br>a. Seluruh pegawai agar menyusun perjanjian kinerja;<br>b. Dokumen crosscuting agar memuat keterlibatan pihak-pihak/pemagku kepentingan eksternal dalam pencapaian sasaran;<br>c. Mengupload dokumen perencanaan pada website yang dapat diakses oleh masyarakat secara umum;<br>d. Rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya agar ditindaklanjuti seluruhnya. | a. Perjanjian Kinerja Telah disusun<br>b. Crosscuting telah memuat keterlibatan pihak-pihak/pemagku kepentingan eksternal dalam pencapaian sasaran<br>c. Dokumen Perencanaan telah diupload pada website<br>d. Rekomendasi Tahun sebelumnya telah ditindaklanjuti (Bukti upload 1a dan 1b)<br><br>Bukti Dukung pada link:<br>https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TuzMxsSHVmLeCYHHYE9bvHYxhfH-WvaF |

### 3.2.2 Penghargaan

Pada tahun 2025, Tidak ada penghargaan/ prestasi yang diraih Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri,

**Inovasi**

Pada Tahun Anggaran 2025, inovasi yang dilakukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri yaitu:

1. Jus Manis Joss (Ijin Usaha Mikro Mudah Gratis melalui Jemput Online Single Submission), Pelayanan keliling "jus manis joss" merupakan pelayanan perizinan secara online kepada masyarakat Kabupaten Kediri guna mendekatkan, mempermudah dan menjemput pelayanan izin usaha mikro kepada pelaku usaha di Kabupaten Kediri;
2. SIDAPOTIK (Sistem Informasi Data Potensi Investasi Terintegrasi Kabupaten Kediri), Aplikasi ini bertujuan menyediakan data base potensi investasi yang aktual dan terintergrasi yang disajikan secara online sehingga memudahkan para calon investor dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi dan pelaksanaan analisa investasi yang akurat.
3. KESATU (Kediri Satu Pintu), Transformasi digital pelayanan publik di Kabupaten Kediri. Sistem pelayanan digital satu pintu dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri. Aplikasi ini berfungsi sebagai gerbang Single Sign On (SSO) untuk pengajuan perizinan, antrean online, dan informasi, yang dapat diakses melalui website www.kesatu.go.id atau aplikasi Android.

# BAB IV
# P E N U T U P

## 4.1 KESIMPULAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah daerah di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri dan Peraturan Bupati Kediri Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.

Penyelenggaraan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kediri pada Tahun Anggaran 2025 telah memasuki tahun ke-5 dari Rencana Strategis DPMPTSP Kabupaten Kediri. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPMPTSP disajikan pada tabel berikut :

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | % CAPAIAN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan di Daerah | Nilai Realisasi Investasi di Daerah (Juta Rupiah) | 1.541.237 | 1.688.461 | 109,55% |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayan Perizinan | 88,13 | 89,52 | 101,58% |
| | Jumlah kemitraan usaha yang bisa didorong | 3 MoU | 3 MoU | 100,00% |

Dari segi penyerapan realisasi belanja Program/Kegitan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri Tahun 2025 mencapai sebesar 89,59%.

## 4.2 RENCANA TINDAKLANJUT

Meskipun realisasi kinerja sasaran dan anggaran pada tahun 2025 dapat tercapai dengan baik. Hal tersebut merupakan satu bagian dari gambaran besar target kerja dari DPMPTSP kabupaten Kediri. Banyak tugas yang harus dilaksanakan ke depan untuk mencapai tujuan/sasaran Rencana strategis DPMPTSP dengan optimalisasi sumberdaya yang ada. Selanjutnya DPMPTSP merumuskan rencana tindaklanjut sebagai berikut:

1. Masih perlunya peningkatan sarana dan prasarana dinas untuk menunjang peningkatan kualitas pelayanan SKPD dan salah satu unsur penilaian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pengadaan sarana prasarana pada tahun sebelumnya menyesuaikan kemampuan anggaran daerah. Sehingga dibelanjakan dengan memperhatikan skala prioritas;
2. Pembangunan Mall Pelayanan Publik (MPP) Tahap 2, telah dilakukan pada tahun 2025. Grand Launching MPP Kabupaten Kediri pada tanggal 24 September 2025. Dalam proses perkembangannya diperlukan evaluasi untuk lebih baik ke depannya
3. Upaya untuk memberikan kemudahan investasi di daerah pada tahun 2025, draft Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal telah dibahas bersama dewan/legislatif, dan menunggu hasil fasilitasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal merupakan petunjuk teknis terkait pemberian fasilitasi/ kemudahan penanaman modal;
4. Perlunya penambahan personil yang mempunyai kompetensi di bidang IT dan hukum;
5. Perluasan investasi dengan pengembangan pelaku usaha lokal;
6. Pengembangan investasi sektor logistik dan pergudangan, Kesehatan dan rekreasi, Real estat;
7. Fasilitasi kemitraan UMKM dengan industri besar
8. Hilirisasi hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah;

9. Optimalisasi Promosi investasi dengan memprioritaskan promosi pada sektor efektif;
10. Identifikasi izin skala kecil yang berpotensi berkembang;
11. Penguatan Klinik investasi (K-LINKED) untuk penyelesaian hambatan realisasi;
12. Penyediaan ruang display arsip baik secara manual maupun digital.

# LAMPIRAN

01 **Perubahan Perjanjian Kinerja 2025**

02 **Surat Pernyataan Kepeminatan Kerjasama Dunia Usaha Tahun 2025**

03 **Rekap Realisasi Investasi Tahun 2025**

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Joko Suwono, S.Sos., M.AP.**
**Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

**Nama : Hanindhito Himawan Pramana**
**Jabatan : Bupati Kediri**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kediri, 8 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Kedua,
Bupati Kediri

Hanindhito Himawan Pramana

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Pertama,
Kepala DPMPTSP

Joko Suwono, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197501031993111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2025**
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI**

| No | Sasaran Strategis | Indikator | Target |
|---|---|---|---|
| 1. | Meningkatnya Kinerja Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Di Daerah | Nilai Realisasi Investasi Di Daerah (Juta Rupiah) | 1.541.237,28 |
| | | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perizinan | 88,13 |
| | | Jumlah Kemitraan Usaha Yang Bisa Didorong | 3 Mou |

| No | Program | | Anggaran |
|---|---|---|---|
| 1. | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Rp. | 2.055.173.165,- |
| 2. | Pengembangan Iklim Penanaman Modal | Rp. | 263.877.800,- |
| 3. | Promosi Penanaman Modal | Rp. | 166.287.300,- |
| 4. | Pelayanan Penanaman Modal | Rp. | 519.547.000,- |
| 5. | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal | Rp. | 275.886.200,- |
| 6. | Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Rp. | 105.793.040,- |
| | **Jumlah Anggaran** | **Rp.** | **3.386.564.505,-** |

Kediri, 8 September 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Kedua,
Bupati Kediri

Hanindhito Himawan Pramana

Ditandatangani secara elektronik oleh:
Pihak Pertama,
Kepala DPMPTSP

Joko Suwono, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda
NIP 197501031993111001

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
Telepon (0354) 681227 68174, Pos el dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

# KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 15 Oktober 2025, di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.
| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | DAPUR LANSIA DAN DISABILITAS KEPUNG |
| NIB | : | - |
| Alamat Perusahaan | : | Ds. Siman, Kec. Kepung, Kab. Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Bima Atmajaya |
| Jabatan | : | Ketua |
| No. HP | : | 081357012589 |
| Email | : | - |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II.
| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | NUSANTARA FRESH |
| NIB | : | - |
| Alamat Perusahaan | : | Perum. Griya Pelem Indah Persada Blok G-8, Pelem, Pare, Kediri. |
| Penanggung Jawab | : | Zaidar Robith |
| Jabatan | : | Owner |
| No. HP | : | 082257722575 |
| Email | : | newcavendishnusantara@gmail.com |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerja sama kemitraan terkait **Supply Buah Pisang Cavendish** yang selanjutnya disebut dengan Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan ini adalah menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan kerja sama kemitraan untuk mendorong keikutsertaan PIHAK KEDUA sebagai pengusaha nasional di daerah dalam kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2**
**RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama kebutuhan **Supply Buah Pisang Cavendish** sesuai dengan proses pengadaan dan standar pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**
**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

Dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penerima dalam terkait **Supply Buah Pisang Cavendish**
b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penyedia dalam terkait **Supply Buah Pisang Cavendish**

**PASAL 4**
**PELAKSANAAN KEMITRAAN**

Kesepekatan ini akan ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kerja antara PARA PIHAK dengan diketahui oleh DPMPTSP Kabupaten Kediri.

**PASAL 5**
**MASA BERLAKU**

Kesepakatan ini mulai berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**PASAL 6**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perselihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara mediasi, dengan DPMPTSP Kabupaten Kediri sebagai mediator.

**PASAL 7**
**LAIN-LAIN**

Dalam hal Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disepakati oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK wajib menyampaikan hal tersebut kepada DPMPTSP Kabupaten Kediri.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| **Dapur Lansia dan Disabilitas Kepung** | **Nusantara Fresh** |
| ( ..... ) | ( ..... ) |

Mengetahui,
**KEPALA DPMPTSP**
**KABUPATEN KEDIRI**

**JOKO SUWONO, S.Sos.,M.AP**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
Telepon (0354) 681227 68174, Pos el dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

# KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

Bahwa pada hari ini, Rabu ..... tanggal 15 Oktober 2025 ....., di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.
| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | LTE CRUISE |
| NIB | : | 011220016574 |
| Alamat Perusahaan | : | Perumahan Oasis Cluster Kav. 10 Jl. Pancawarna, Tulungrejo, Pare Kab. Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Nur Haidi |
| Jabatan | : | Direktur |
| No. HP | : | 081388457710 |
| Email | : | ltecruise@gmail.com |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II.
| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT GIANDRA BISA BERSMA |
| NIB | : | 2104250077773 |
| Alamat Perusahaan | : | Jalan Raya Gampeng Selatan 002/002 Gampengrejo Kab. Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Saefudin |
| Jabatan | : | Direktur Operasional |
| No. HP | : | 081283693386 |
| Email | : | giandrabisabersama@gmail.com |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerja sama kemitraan terkait **Pekerjaan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Hotel dan Kapal Pesiar Internasional** yang selanjutnya disebut dengan Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan ini adalah menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan kerja sama kemitraan untuk mendorong keikutsertaan PIHAK KEDUA sebagai pengusaha nasional di daerah dalam kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2**
**RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama kebutuhan **Pekerjaan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Hotel dan Kapal Pesiar Internasional** sesuai dengan proses pengadaan dan standar pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**
**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

Dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penerima dalam terkait **Pekerjaan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Hotel dan Kapal Pesiar Internasional**
b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penyedia dalam terkait **Pekerjaan Pelatihan Calon Tenaga Kerja Hotel dan Kapal Pesiar Internasional**

**PASAL 4**
**PELAKSANAAN KEMITRAAN**

Kesepekatan ini akan ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kerja antara PARA PIHAK dengan diketahui oleh DPMPTSP Kabupaten Kediri.

**PASAL 5**
**MASA BERLAKU**

Kesepakatan ini mulai berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**PASAL 6**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perselihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara mediasi, dengan DPMPTSP Kabupaten Kediri sebagai mediator.

**PASAL 7**
**LAIN-LAIN**

Dalam hal Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disepakati oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK wajib menyampaikan hal tersebut kepada DPMPTSP Kabupaten Kediri.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK PERTAMA
**LTE CRUISE**




( ..... )

PIHAK KEDUA
**PT GIANDRA BISA BERSAMA**

( ..... )

Mengetahui,
**KEPALA DPMPTSP**
**KABUPATEN KEDIRI**

**JOKO SUWONO, S.Sos.,M.AP**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
Telepon (0354) 681227 68174, Pos el dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

# KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 15 Oktober 2025, di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.

| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTORAN INDONESIA (PHRI) KEDIRI |
| NIB | : | - |
| Alamat Perusahaan | : | Sekertariat di Hotel Mitra Inn, Jl. Mayor Bismo 355 Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Esterrita |
| Jabatan | : | Ketua |
| No. HP | : | 08121755404 |
| Email | : | |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II.

| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT SINAR KEDIRI SAKTI |
| NIB | : | - |
| Alamat Perusahaan | : | Dsn. Gayam Timur, Ds. Gayam, Kec. Gurah, Kab. Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Galih Febrianto |
| Jabatan | : | SPV Marketing |
| No. HP | : | 085885377413 |
| Email | : | gfebrianto62@gmail.com |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerja sama kemitraan terkait **Pekerjaan Penyediaan Furniture** yang selanjutnya disebut dengan Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan ini adalah menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan kerja sama kemitraan untuk mendorong keikutsertaan PIHAK KEDUA sebagai pengusaha nasional di daerah dalam kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2**
**RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama kebutuhan **Pekerjaan Penyediaaan Furniture** sesuai dengan proses pengadaan dan standar pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**
**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

Dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penerima dalam terkait **Pekerjaan Penyediaan Furniture**
b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penyedia dalam terkait **Pekerjaan Penyediaan Furniture**

**PASAL 4**
**PELAKSANAAN KEMITRAAN**

Kesepekatan ini akan ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kerja antara PARA PIHAK dengan diketahui oleh DPMPTSP Kabupaten Kediri.

**PASAL 5**
**MASA BERLAKU**

Kesepakatan ini mulai berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**PASAL 6**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perselihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara mediasi, dengan DPMPTSP Kabupaten Kediri sebagai mediator.

**PASAL 7**
**LAIN-LAIN**

Dalam hal Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disepakati oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK wajib menyampaikan hal tersebut kepada DPMPTSP Kabupaten Kediri.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK PERTAMA
**PHRI KEDIRI**

( ..... )

PIHAK KEDUA
**PT SINAR SAKTI KERDIRI**




( ..... )

Mengetahui,
**KEPALA DPMPTSP**
**KABUPATEN KEDIRI**

**JOKO SUWONO, S.Sos.,M.AP**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
Telepon (0354) 681227 68174, Pos el dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

# KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 15 Oktober 2025, di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.
| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | REAL ESTATE INDONESIA |
| NIB | : | |
| Alamat Perusahaan | : | Jl. Imam Bonjol No. 135 Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Harrys Mahboby |
| Jabatan | : | Ketua |
| No. HP | : | 081335439673 |
| Email | : | |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II.
| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT GLOBALINDO FURNITURE |
| NIB | : | 8120100880571 |
| Alamat Perusahaan | : | Jl. Kediri Kertosono KM 13, Minggiran, Papar, Kab. Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Lilis Handayani |
| Jabatan | : | Purchasing |
| No. HP | : | 08113292786 |
| Email | : | lilis@globalindo.furniture.com |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerja sama kemitraan terkait **Pekerjaan Pemberian Akses Pemasaran Perumahan** yang selanjutnya disebut dengan Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan ini adalah menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan kerja sama kemitraan untuk mendorong keikutsertaan PIHAK KEDUA sebagai pengusaha nasional di daerah dalam kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2**
**RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama kebutuhan **Pekerjaan Pemberian Akses Pemasaran Perumahan** sesuai dengan proses pengadaan dan standar pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**
**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

Dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penyedia dalam terkait **Pekerjaan Pemberian Akses Pemasaran Perumahan**
b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima dalam terkait **Pekerjaan Pemberian Akses Pemasaran Perumahan**

**PASAL 4**
**PELAKSANAAN KEMITRAAN**

Kesepekatan ini akan ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kerja antara PARA PIHAK dengan diketahui oleh DPMPTSP Kabupaten Kediri.

**PASAL 5**
**MASA BERLAKU**

Kesepakatan ini mulai berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**PASAL 6**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perselihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara mediasi, dengan DPMPTSP Kabupaten Kediri sebagai mediator.

**PASAL 7**
**LAIN-LAIN**

Dalam hal Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disepakati oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK wajib menyampaikan hal tersebut kepada DPMPTSP Kabupaten Kediri.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| **REAL ESTATE INDONESIA** | **PT GLOBALINDO FURNITURE** |
| ( Harrys Mahbaby ) | ( LILIS HANDAYANI ) |

Mengetahui,
**KEPALA DPMPTSP**
**KABUPATEN KEDIRI**

**JOKO SUWONO, S.Sos.,M.AP**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
Telepon (0354) 681227 68174, Pos el dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

# KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 15 Oktober 2025, di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.
| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | REAL ESTATE INDONESIA |
| NIB | : | - |
| Alamat Perusahaan | : | Paron 11, Paron, Kec. Ngasem Kab. Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Harrys Mahboby |
| Jabatan | : | Ketua |
| No. HP | : | 081335439673 |
| Email | : | |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

II.
| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT SINAR KEDIRI SAKTI |
| NIB | : | - |
| Alamat Perusahaan | : | Dsn. Gayam Timur, Ds. Gayam, Kec. Gurah, Kab. Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Galih Febrianto |
| Jabatan | : | SPV Marketing |
| No. HP | : | 085885377413 |
| Email | : | gfebrianto62@gmail.com |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerja sama kemitraan terkait **Pekerjaan Pemberian Akses Pemasaran Perumahan** yang selanjutnya disebut dengan Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan ini adalah menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan kerja sama kemitraan untuk mendorong keikutsertaan PIHAK KEDUA sebagai pengusaha nasional di daerah dalam kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2**
**RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama kebutuhan **Pekerjaan Pemberian Akses Pemasaran Perumahan** sesuai dengan proses pengadaan dan standar pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**
**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

Dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penyedia dalam terkait **Pekerjaan Pemberian Akses Pemasaran Perumahan**
b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima dalam terkait **Pekerjaan Pemberian Akses Pemasaran Perumahan**

**PASAL 4**
**PELAKSANAAN KEMITRAAN**

Kesepekatan ini akan ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kerja antara PARA PIHAK dengan diketahui oleh DPMPTSP Kabupaten Kediri.

**PASAL 5**
**MASA BERLAKU**

Kesepakatan ini mulai berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**PASAL 6**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perselihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara mediasi, dengan DPMPTSP Kabupaten Kediri sebagai mediator.

**PASAL 7**
**LAIN-LAIN**

Dalam hal Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disepakati oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK wajib menyampaikan hal tersebut kepada DPMPTSP Kabupaten Kediri.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

PIHAK PERTAMA
**REAL ESTATE INDONESIA**

( Harrys Mahbaby )

PIHAK KEDUA
**PT SINAR KEDIRI SAKTI**




( ..... )

Mengetahui,
**KEPALA DPMPTSP**
**KABUPATEN KEDIRI**

**JOKO SUWONO, S.Sos.,M.AP**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
Telepon (0354) 681227 68174, Pos el dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

# KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 15 Oktober 2025, di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.
| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT SINAR KEDIRI SAKTI |
| NIB | : | - |
| Alamat Perusahaan | : | Dsn. Gayam Timur, Ds. Gayam, Kec. Gurah, Kab. Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Galih Febrianto |
| Jabatan | : | SPV Marketing |
| No. HP | : | 085885377413 |
| Email | : | gfebrianto62@gmail.com |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II.
| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | REAL ESTATE INDONESIA |
| NIB | : | - |
| Alamat Perusahaan | : | Jl. Imam Bonjol No. 135 Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Harrys Mahboby |
| Jabatan | : | Ketua |
| No. HP | : | 081335439673 |
| Email | : | |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerja sama kemitraan terkait **Pekerjaan Penyediaan Furniture** yang selanjutnya disebut dengan Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

KEDUA sebagai pengusaha nasional di daerah dalam kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2**

**RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama kebutuhan **Pekerjaan Penyediaaan Furniture** sesuai dengan proses pengadaan dan standar pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**

**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

Dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penyedia dalam terkait **Pekerjaan Penyediaan Furniture**
b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima dalam terkait **Pekerjaan Penyediaan Furniture**

**PASAL 4**

**PELAKSANAAN KEMITRAAN**

Kesepekatan ini akan ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kerja antara PARA PIHAK dengan diketahui oleh DPMPTSP Kabupaten Kediri.

**PASAL 5**

**MASA BERLAKU**

Kesepakatan ini mulai berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**PASAL 6**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perselihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara mediasi, dengan DPMPTSP Kabupaten Kediri sebagai mediator.

**PASAL 7**

**LAIN-LAIN**

Dalam hal Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disepakati oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK wajib menyampaikan hal tersebut kepada DPMPTSP Kabupaten Kediri.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| **PT SINAR SAKTI KEDIRI** | **REAL ESTATE INDONESIA** |
| ( ..... ) | ( ..... ) |

Mengetahui,
**KEPALA DPMPTSP**
**KABUPATEN KEDIRI**

**JOKO SUWONO, S.Sos.,M.AP**
Pembina Utama Muda
NIP. 19750103 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**
Jalan Soekarno-Hatta Nomor 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri
Telepon (0354) 681227 68174, Pos el dpmptsp@kedirikab.go.id
Laman www.kedirikab.go.id

# KESEPAKATAN KEMITRAAN USAHA

Bahwa pada hari ini, Rabu tanggal 15 October 2025, di kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayana Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri, yang bertanda tangan di bawah ini:

I.

| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | PT GLOBALINDO FURNITURE |
| NIB | : | 8120100880571 |
| Alamat Perusahaan | : | Jl. Kediri Kertosono KM 13, Minggiran, Papar, Kab. Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Lilis Handayani |
| Jabatan | : | Purchasing |
| No. HP | : | 08113292786 |
| Email | : | lilis@globalindo.furniture.com |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

II.

| | | |
|---|---|---|
| Nama Perusahaan | : | REAL ESTATE INDONESIA |
| NIB | : | |
| Alamat Perusahaan | : | Jl. Imam Bonjol No. 135 Kediri |
| Penanggung Jawab | : | Harrys Mahboby |
| Jabatan | : | Ketua |
| No. HP | : | 081335439673 |
| Email | : | |

Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan kerja sama kemitraan terkait **Pekerjaan Penyediaan Furniture** yang selanjutnya disebut dengan Kesepakatan, dengan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1**
**MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan tujuan dari Kesepakatan ini adalah menjadi pedoman bagi PARA PIHAK dalam Pelaksanaan kerja sama kemitraan untuk mendorong keikutsertaan PIHAK KEDUA sebagai pengusaha nasional di daerah dalam kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2**
**RUANG LINGKUP KESEPAKATAN**

Ruang lingkup Kesepakatan ini mencakup kegiatan kerja sama kebutuhan **Pekerjaan Penyediaaan Furniture** sesuai dengan proses pengadaan dan standar pekerjaan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

**PASAL 3**
**TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK**

Dalam Kesepakatan ini, PARA PIHAK bertanggung jawab sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA bertindak sebagai penyedia dalam terkait **Pekerjaan Penyediaan Furniture**
b. PIHAK KEDUA bertindak sebagai penerima dalam terkait **Pekerjaan Penyediaan Furniture**

**PASAL 4**
**PELAKSANAAN KEMITRAAN**

Kesepekatan ini akan ditindaklanjuti dengan suatu Perjanjian Kerja antara PARA PIHAK dengan diketahui oleh DPMPTSP Kabupaten Kediri.

**PASAL 5**
**MASA BERLAKU**

Kesepakatan ini mulai berlaku selama satu tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

**PASAL 6**
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila di kemudian hari timbul perselihan terkait penafsiran dan/atau pelaksanaan Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat akan menyelesaikannya dengan cara mediasi, dengan DPMPTSP Kabupaten Kediri sebagai mediator.

**PASAL 7**

**LAIN-LAIN**

Dalam hal Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dapat disepakati oleh PARA PIHAK, PARA PIHAK wajib menyampaikan hal tersebut kepada DPMPTSP Kabupaten Kediri.

Demikian Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK tanpa paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana perlunya.

| PIHAK PERTAMA | PIHAK KEDUA |
|---|---|
| **PT GLOBALINDO FURNITURE** | **REAL ESTATE INDONESIA** |
| METERAI TEMPEL 3B64FALX188504743 | REAL ESTATE INDONESIA |
| ( LILIS HANDAYANI ) | ( Harrys Mahbaby ) |

Mengetahui,

**KEPALA DPMPTSP**

**KABUPATEN KEDIRI**

**JOKO SUWONO, S.Sos.,M.AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750103 199311 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Soekarno Hatta Nomor 14, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 681227, 681741, 686099, Pos El: dpmptsp@kedirikab.go.id,
Laman: kedirikab.go.id

# REALISASI INVESTASI TAHUN 2025

| TARGET INVESTASI 2025 | URAIAN | JUMLAH | TK | NIB | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.541.237.280.000 | **LKPM** | **1,090,107,612,307** | **461** | **1,081** | |
| | TW I | 271,011,523,453 | 461 | 157 | Sumber : data.bkpm.go.id |
| | TW II | 326,305,426,509 | 1,123 | 312 | Sumber : data.bkpm.go.id |
| | TW III | 141,948,936,317 | 208 | | Sumber : data.bkpm.go.id |
| | TW IV | 350,841,726,028 | 814 | 612 | Sumber : data.bkpm.go.id |
| | **MIKRO** | **598,353,504,230** | **40,866** | **13,088** | |
| | JANUARI | 35,104,587,056 | 2,396 | 658 | Sumber : oss.go.id |
| | FEBRUARI | 79,307,239,195 | 3,658 | 1,186 | Sumber : oss.go.id |
| | MARET | 58,430,225,200 | 3,347 | 1,090 | Sumber : oss.go.id |
| | APRIL | 31,744,440,988 | 2,356 | 952 | Sumber : oss.go.id |
| | MEI | 51,666,220,088 | 4,118 | 1,116 | Sumber : oss.go.id |
| | JUNI | 62,980,838,888 | 3,663 | 1,094 | Sumber : oss.go.id |
| | JULI | 65,867,507,674 | 5,590 | 1,459 | Sumber : oss.go.id |
| | AGUSTUS | 53,995,633,050 | 4,457 | 1,358 | Sumber : oss.go.id |
| | SEPTEMBER | 65,047,919,740 | 4,775 | 1,246 | Sumber : oss.go.id |
| | OKTOBER | 38,331,282,785 | 2,985 | 914 | Sumber : oss.go.id |
| | NOVEMBER | 6,134,435,000 | 646 | 658 | Sumber : oss.go.id |
| | DESEMBER | 49,743,174,566 | 2,875 | 1,357 | Sumber : oss.go.id |
| | | | | | |
| | **JUMLAH** | **1,688,461,116,537** | **41,327** | **14,169** | |